

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

REVISI

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2014-2018**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin No 20 Sekojo Pangkalan Balai

Telp 0711-7690021

Website : www.dishub.banyuasinkab.go.id email : webmail.banyuasinkab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 186 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 790 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Darat dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin umumnya dan Dinas Perhubungan khususnya memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal. Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. Data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kemajuan dibidang transportasi yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang transportasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dibidang transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sector transportasi memberikan pengaruh besar dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Banyuasin.

Kemudian untuk mendukung Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 dengan mengusung Visi “Banyuasin Terdepan, Berdaya Saing, dan Mandiri” perlu dukungan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di OPD termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD harus dirancang, disusun dan disajikan dalam dokumen yang disebut Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan system pelayanan perhubungan yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Banyuasin dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin 2014 – 2018, didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700)
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur – Pelayaran Sungai dan Danau;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur; Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660)
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
26. Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 186 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwasin
27. Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 790 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Darat, dan Unit Pelaksana teknis Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwasin

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas – prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014 – 2018 dapat tercapai;
- 2) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- 3) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
- 4) Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- 5) Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu – isu Strategi
- Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan
 - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 - 4.3. Strategi Kebijakan
- Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
 - 5.1. Program dan Kegiatan
 - 5.2. Indikator Kinerja
 - 5.3. Kelompok Sasaran
 - 5.4. Pendanaan Indikatif
- Bab VI PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas fungsi melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, meliputi Darat, Sungai, Laut dan Penyeberangan.

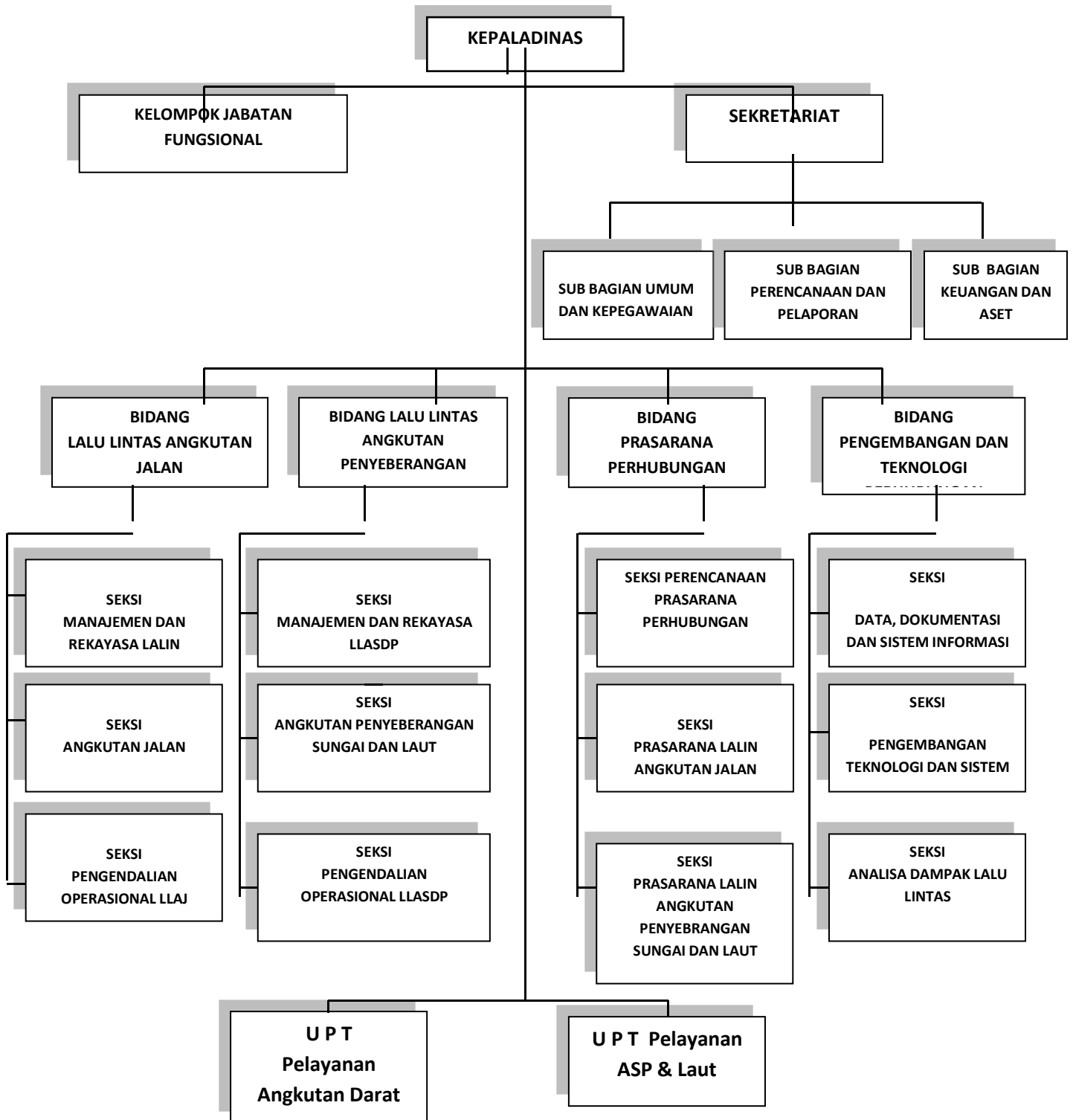
Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwasin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh :

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. Bidang Prasarana Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Perencanaan Prasarana Perhubungan, Seksi Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Seksi Prasarana Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan Sungai dan Laut;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Seksi Angkutan Jalan dan Seksi Pengendalian, Keselamatan dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan Sungai dan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Penyeberangan Sungai dan Laut, Seksi Angkutan Penyeberangan Sungai dan Laut dan Seksi Pengendalian Keselamatan dan Operasional Sungai dan Laut;
5. Bidang Pengembangan dan Teknologi Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Data, Dokumentasi dan Sistem Informasi, Seksi Pengembangan Teknologi dan Sistem Transportasi dan Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pelayanan Angkutan Darat dibantu 1 (satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) satuan kerja (satker) yaitu Satker Terminal, Satker Parkir, Satker Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan

dibantu 1 (satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan 2 (dua) satuan kerja (satker) yaitu Satker Pelabuhan Sungai dan Laut dan Satker Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Khusus;

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN



a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan segala urusan dan kegiatan dibidang Perhubungan serta pengelolaan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penyeberangan sungai dan laut yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penyeberangan sungai dan laut yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan;
3. Pengkoordinasian, pengendali dan pengawas serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
4. Penetapan tujuan jangka panjang, jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Banyuwangi;
5. Perumusan program kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
7. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- (1) Penyusunan program kerja sekretariat dinas perhubungan;
- (2) Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- (3) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan penyusunan produk hukum daerah;
- (4) Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran dinas perhubungan;
- (5) Penyiapan data, informasi hubungan masyarakat serta pelaksanaan inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum;
- (6) Pelaksanaan kebijakan program perhubungan;
- (7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program perhubungan;

- (8) Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- (9) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- (10) Penyelenggaraan keputakaan internal;
- (11) Penyelenggaraan pengendalian internal;
- (12) Pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
- (13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- e. Melaksanakan/mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan dan protokol, surat menyurat telex, faxsimilie, telegram radio telekomunikasi dan telpon serta arsip intern;
- f. Melaksanakan dan mengelola administrasi barang;
- g. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses pengangkatan, penugasan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- h. Mengajukan daftar urut kepangkatan (DUK) dan daftar nominatif pegawai;
- i. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan program dan pelaporan;
- d. Mendata urusan perhubungan;
- e. Menyiapkan kebijakan program urusan perhubungan;

- f. Memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi-seksi unit dinas perhubungan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- h. Menyiapkan bahan penyusunan indikator Kinerja utama (IKU);
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja (RENJA/Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN));
- j. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
- k. Menyiapkan dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- l. Menyiapkan dan membuat laporan dinas dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada dinas perhubungan;
- m. Menginventarisasi hasil pengawasan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. Menyiapkan, menghimpun, menyimpan dan mendokumentasikan laporan hasil pemeriksaan laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ke SIM HP;
- o. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan aset;
- b. Menyiapkan bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) / Kerangka Acuan Kerja (KAK) anggaran rutin;
- c. Memantau pelaksanaan anggaran rutin;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran;
- e. Menyusun/mencatat realisasi anggaran rutin, rencana, pembagian dan penerimaan negara bukan pajak;
- f. Menghimpun daftar transaksi, dokumentasi, surat perintah membayar (SPM) dan informasi keuangan yang berisi bukti jurnal, buku besar, buku pembantu dan melaksanakan pemeriksaan atas kelengkapannya;
- g. Memverifikasi surat pertanggungjawabkan (SPJ) yang akan disampaikan ke atasan;
- h. Melaksanakan administrasi inventarisasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang;

- i. Melaksanakan pengusulan penghapusan barang;
- j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan laporan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, pengendalian, operasional dan keselamatan lalu lintas;
2. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Penyusunan, pembinaan, pengawasam, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan jalan, operasional dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap prasarana lalu lintas angkutan jalan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan :

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- e. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan;
- g. Melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan;

- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan;
- i. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan rekayasa lalu lintas jalan;
- j. Melaksanakan perencanaan, pengawasan teknis dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali lalu lintas dan sarana prasarana lainnya;
- k. Melaksanakan pengaturan sirkulasi arus lalu lintas di jalan;
- l. Melakukan inspeksi keselamatan Lalu lintas jalan, laik fungsi jalan keselamatan sarana;
- m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- n. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas :

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang;
- d. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran seksi angkutan jalan;
- e. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran angkutan jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan angkutan jalan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan angkutan barang;
- h. Melaksanakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
- i. Melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan;

- j. Melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan daerah kabupaten;
- k. Melaksanakan penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan;
- l. Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah;
- m. Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- n. Menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- o. Menertibkan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- p. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengendalian, Keselamatan dan Operasional Lalu lintas Angkutan jalan mempunyai tugas :

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian, keselamatan dan operasional lalu lintas angkutan jalan;
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, keselamatan dan operasional lalu lintas angkutan jalan;
- e. Melaksanakan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi;
- g. Melaksanakan fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- h. Melaksanakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi;

- i. Melakukan pengawasan dan pengendalian transportasi logistik, angkutan barang non penumpang;
- j. Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan mobil unit penolong (DEREK);
- k. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran pengendalian, keselamatan dan operasional lalu lintas angkutan jalan;
- l. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran pengendalian, keselamatan dan operasional lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan pengendalian keselamatan dan operasional lalu lintas angkutan jalan;
- n. Memfasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan umum fasilitasi kelayakan kendaraan, penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- o. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai , Penyeberangan (ASP) dan Laut

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan (ASP) dan Laut mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengawasan/ monitoring dan pengelolaan fasilitas dermaga, pelabuhan dan penyebrangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas, pengendalian, operasional dan keselamatan lalu lintas angkutan penyebrangan sungai dan laut;
- b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas angkutan penyebrangtan sungai dan laut;

- c. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan operasional dan keselamatan lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- d. Pelaksanaan pengawasan/monitoring dan pengelolaan fasilitas dermaga, pelabuhan dan penyeberangan bidang lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengawalan dan pengendalian lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Penyeberangan (ASP) dan Laut mempunyai tugas :

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan lintas penyeberangan;
- e. Melaksanakan kebijakan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan lintas penyeberangan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan lintas penyeberangan;
- g. Melaksanakan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan alur pelayaran dalam kabupaten;
- h. Melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah;
- i. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut sesuai dengan lingkup tugasnya;

- j. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Melaksanakan pengawasan/monitoring dan pengelolaan fasilitas dermaga, pelabuhan dan penyeberangan bidang lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- l. Menyusun pedoman dan standar teknis penyelenggaraan rekayasa lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- m. Melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, petunjuk, alat pengendali serta prasarana lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- n. Melaksanakan pengaturan sirkulasi arus lalu lintas sungai penyeberangan sungai dan laut;
- o. Melaksanakan penertiban izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- p. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap prasarana perhubungan angkutan jalan;
- q. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas rekayasa lalu lintas penyeberangan sungai dan laut;
- r. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Angkutan Penyeberangan Sungai dan Laut mempunyai tugas :

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- d. Menyusun strategis dan rencana kerja dan anggaran angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- e. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran angkutan penyeberangan sungai dan laut;

- f. Menyusun bahan kebijakan pedoman dan standar teknis penyelenggaraan angkutan sungai penyeberangan sungai dan laut;
- g. Menyiapkan usulan tarif angkutan perairan;
- h. Melaksanakan penertiban izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan;
- i. Melaksanakan penertiban izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten;
- j. Melaksanakan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten;
- k. Menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan;
- l. Melaksanakan penertiban izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan atau badan usaha;
- m. Melaksanakan penertiban izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- n. Melakukan pengawasan dan pengendalian transportasi logistik perairan angkutan perairan;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan angkutan lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- p. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengendalian, Keselamatan dan Operasional ASP dan Laut mempunyai tugas :

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian keselamatan dan operasional lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;

- d. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran pengendalian keselamatan dan operasional lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- e. Melaksanakan penertiban dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal -kapal dibawah pedalaman 7 GT dan persyaratan laik layar;
- f. Melaksanakan penertiban izin usaha badan usaha di pelabuhan pengumpan lokal;
- g. Melaksanakan penertiban izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan;
- h. Melaksanakan penertiban izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- i. Melaksanakan penertiban izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- j. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran pengendalian, keselamatan dan operasional lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyusun pedoman dan standar teknis penyelenggaraan pengendalian, keselamatan dan operasional lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- l. menyiapkan fasilitas keselamatan dan pengawalan personal dan objek vital lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- m. memfasilitasi sosialisasi, promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut, keselamatan perusahaan angkutan perairan serta inspeksi penegakan hukum oleh PPNS di lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- n. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Prasarana Perhubungan

Bidang Prasarana Perhubungan tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, perencanaan prasarana fisik, perusahaan serta evaluasi dan pelaporan. Bidang prasarana perhubungan memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan, dan pengadaan prasarana perhubungan;
2. Pengkajian pengembangan prasarana perhubungan di kawasan pembangunan baru;
3. Penganalisa rencana pembangunan prasarana perhubungan darat dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Penganalisa rencana pembangunan prasarana perhubungan darat bidang lalu lintas dan angkutan sungai penyeberangan laut;
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas dan prasarana perhubungan;
6. Pengkajian penerapan prasarana perhubungan guna menunjang operasional dan keselamatan bidang perhubungan;
7. Pelaksanaan pembangunan prasarana perhubungan dalam menunjang operasional dan keselamatan transportasi dan angkutan umum;
8. Pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal terhadap kajian pembangunan prasarana perhubungan darat;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(1) Seksi perencanaan prasarana perhubungan mempunyai tugas :

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Menyiapkan data, penyusunan rencana tentang kebutuhan prasarana di bidang perhubungan;
- d. Menyiapkan perumusan kebijakan dan penerapan prasarana perhubungan;
- e. Menyiapkan usulan penambahan, pengadaan dan pengembangan prasarana perhubungan;
- f. Melakukan analisa, kajian, dan kelayakan bidang perhubungan terkait masalah transportasi dan angkutan umum;
- g. Menyiapkan bahan guna kajian terhadap rencana pengembangan prasarana perhubungan;
- h. Melakukan kajian terhadap penambahan, pengembangan, rehabilitasi dermaga, pelabuhan atau pos penjagaan perhubungan;
- i. Melakukan kajian terhadap penambahan, pengembangan, rehabilitasi prasarana lalu lintas marka jalan penerangan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas lainnya;

- j. Melakukan akselerasi pembangunan prasarana perhubungan terhadap kajian - kajian berwawasan lingkungan hidup;
- k. Melaksanakan kontrol pengawasan dan kerjasama dengan pihak terkait terhadap rencana pengembangan wilayah terkait rencana pengembangan wilayah terkait urusan perhubungan darat;
- l. Melakukan distribusi sarana dan prasarana perhubungan;
- m. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi prasarana angkutan jalan mempunyai tugas :

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Melaksanakan rencana dan program pengembangan prasarana angkutan jalan;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- e. Melaksanakan pembangunan prasarana angkutan jalan, termasuk rambu, marka dan rambu pendahulu petunjuk jalan (RPPJ), lalu lintas angkutan jalan (LLAJ),
- f. mengawasi operasional terminal, rambu-rambu lalu lintas fasilitas parkir, marka jalan, median jalan trotoar rambu pengahulu petunjuk jalan (RPPJ), delinator, cermin lalu lintas, guard rail dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
- g. Melaksanakan pengawasan / monitoring pengelolaan fasilitas lalu lintas, transportasi dan lalu lintas angkutan jalan;
- h. Memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan dan pengembangan fasilitas lalu lintas, transportasi dan angkutan jalan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan prasarana angkutan jalan;
- j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi prasarana angkutan sungai penyebrangan sungai dan laut mempunyai tugas :

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;

- c. Melaksanakan rencana dan program pengembangan dan pembangunan prasarana perhubungan;
- d. Melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, petunjuk, alat pengendali serta prasarana lalu lintas angkutan penyeberangan sungai dan laut;
- e. Mengawasi operasional rambu-rambu air, fasilitas parkir kapal atau sandar dermaga dan penyeberangan dan pelabuhan;
- f. Melakukan monitoring terhadap prasarana angkutan sungai penyeberangan dan laut;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan prasarana angkutan sungai penyeberangan dan laut;
- h. Menyiapkan bahan penetapan lokasi pembangunan, pemeliharaan, pengawasan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu-rambu angkutan sungai penyeberangan/laut);
- i. Melaksanakan penertiban izin pelabuhan pengumpan lokal;
- j. Melaksanakan penertiban izin pelabuhan sungai;
- k. Melaksanakan penertiban izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan, pelabuhan pengumpul lokal;
- l. Melaksanakan penertiban izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- m. Melaksanakan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
- n. Melaksanakan pembangunan pelabuhan sungai;
- o. Melaksanakan kebijakan teknis bidang prasarana angkutan sungai penyeberangan laut;
- p. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Pengembangan dan Teknologi Perhubungan

Bidang pengembangan dan teknologi perhubungan melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. Bidang pengembangan memiliki fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan sistem informasi perhubungan;

2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem transportasi dan teknologi perhubungan;
3. Penganalisa rencana pengembangan pengembangan sistem transportasi dan sistem informasi perhubungan;
4. Pengumpulan data dokumentasi terkait bidang perhubungan sebagai bentuk bank data perhubungan di kabupaten;
5. Pelaksakan kebijakan penerapan sistem informasi, digitalisasi komputer untuk urusan administrasi perhubungan;
6. Penyiapan bahan kajian perumusan dan analisa dampak lalu lintas;
7. Penyusunan bahan kebijakan terkait penerapan dan pelaksanaan sistem informasi dan teknologi perhubungan;
8. Pelaksanaan koordinasi vertikal horizontal terkait pengembangan sistem transportasi dan sistem informasi perhubungan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Seksi data, dokumentasi dan sistem informasi melaksanakan tugas :

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Menyusun rencana dan program terkait masalah inventarisasi data, dokumentasi dan sistem informasi perhubungan;
- d. Menyusun bahan kebijakan terkait penerapan dan melaksanakan operasional sistem informasi perhubungan;
- e. Melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan teknologi informasi terkait urusan transportasi atau perhubungan darat;
- f. Mengelola dan mengkaji penggunaan dan penerapan teknologi informasi, digitalisasi dan komputer pada urusan perhubungan darat;
- g. Melaksanakan perhitungan lalu lintas harian rata-rata (LHR);
- h. Melaksanakan pendataan jumlah kecelakaan lalu lintas angkutan jalan;
- i. Melaksanakan pembentukan bank data, perpustakaan kecil dan dokumentasi arsip urusan perhubungan;
- j. Menginventarisir data, dokumentasi dan sistem informasi perhubungan;

- k. Melakukan koordinasi terkait masalah data dokumentasi dan sistem informasi dengan pihak yang berkepentingan lainnya;
- l. Melaksanakan pengkajian penerapan sistem informasi perhubungan;
- m. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi pengembangan teknologi dan sistem transportasi :

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Menyusun rencana dan program terkait masalah pengembangan teknologi dan sistem transportasi dan angkutan umum;
- d. Melaksanakan kebijakan dan program bidang pengembangan teknologi dan sistem transportasi;
- e. Menyusun bahan kebijakan terkait penerapan dan pelaksanaan sistem transportasi dan angkutan umum;
- f. Mengkaji pengembangan teknologi sistem transportasi dan pemanduan moda transportasi nasional untuk jalur logistik dan penumpang di wilayah kabupaten;
- g. Melaksanakan dan menyusun bahan kajian pengembangan sistem transportasi daerah terkait penambahan akses transportasi barang dan penumpang;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan teknologi perhubungan dan sistem transportasi;
- i. Menyiapkan bahan terkait tatanan transportasi lokal, wahana tata nagraha dan koordinasi bidang transportasi angkutan umum;
- j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Analisa dampak lalu lintas :

- a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- c. Menyusun rencana dan program terkait masalah pengembangan sistem transportasi dan angkutan umum;

- d. Menyusun bahan kebijakan terkait penerapan dan pelaksanaan sistem transportasi dan angkutan umum;
- e. Melaksanakan kebijakan dan program analisa dampak lalu lintas;
- f. Mengkaji dampak pemanduan multimoda transportasi;
- g. Memberikan rekomendasi dan kajian lalu lintas jalan dan sungai penyeberangan dan laut terhadap pembangunan suatu kawasan;
- h. Memprediksi dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
- i. Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
- j. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/ perbaikan;
- k. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi keselamatan lalu lintas jalan, sungai, penyeberangan dan laut;
- l. Menangani permasalahan lalu lintas darat maupun sungai, penyeberangan dan laut;
- m. Menganalisa dampak lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai penyeberangan dan laut;
- n. Membina lomba tertib lalu lintas, pelajar pelopor dan sebagainya;
- o. Melaksanakan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT);
- p. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. (UPT) Pelayanan Angkutan Darat

UPT Pelayanan Angkutan Darat mempunyai fungsi :

- (1) Pengelolaan Administrasi Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat;
- (2) Mengurus surat-surat keluar dan masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat;
- (3) Mengurus arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat;
- (4) Mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat;
- (5) Menyusun Pelaporan Data dari Satuan Kerja;
- (6) Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan

UPT Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

- (1) Pengelolaan Administrasi Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan;
- (2) Mengurus surat-surat keluar dan masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan;
- (3) Mengurus arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan;
- (4) Mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan;
- (5) Menyusun Pelaporan Data dari Satuan Kerja;
- (6) Menghimpun Pendapat Asli Daerah dan Satuan Kerja.

2.2 SUMBER DAYA

Secara kuantitatif jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin berjumlah 79 orang, yang tersebar pada masing-masing bidang dan UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang non teknik. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat S1/DIV. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah sumber daya yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin :

Data Perkembangan Jumlah Pegawai

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2016

No	Jumlah Pegawai	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Jumlah PNS	79	75	72
2	Jumlah THL	66	66	66

--	--	--	--	--

**Data CPNS/ PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2016**

No	PENDIDIKAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	SD	1	1	1
2	SLTP	1	-	2
3	SMU	21	20	14
4	D II	1	2	3
5	D III	10	11	11
6	D IV/ S.1	32	29	31
7	S.2	13	13	10
Jumlah		79	75	72

**Data THL Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2016**

No	PENDIDIKAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SMU	33	33	33
4	D II	-	-	-

5	D III	3	3	3
6	D IV/ S.1	30	30	30
7	S.2	-	-	-
Jumlah		66	66	66

**Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2016**

No	Data Pegawai	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Golongan IV	4	5	6
2	Golongan III	54	53	50
3	Golongan II	21	19	16
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		79	75	72

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Banyuasin melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Banyuasin beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

2.3.1 Angkutan Jalan

a. Prasarana Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat

merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan.

Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 kategori, yaitu jalan nasional, jalan Provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan negara di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2011 mencapai 61 Km,. Panjang jalan Provinsi mencapai 97,5 Km, sedangkan panjang jalan kabupaten mencapai 1.032,20 Km, dengan kondisi baik 398,20 Km, kondisi sedang 46,30 Km, kondisi rusak 43,50 Km dan kondisi rusak 544,20 Km.

b. Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang.

Daftar Terminal

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2012

No.	Nama Terminal	KM	Type	Luas (M ²)	Ket.
1.	Pasar Pagi Betung	± 63	C	-	Masih tanah / operasional
2.	Pasar Pangkalan Balai	± 46	C	-	Operasional
3	Simpang Pulau Rimau	± 51	C	-	Rencana Terminal
4	Talang Keramat	-	C	4.730	Rencana Terminal
5	Simpang PU	± 46	C		Rencana Terminal

c. Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Banyuasin dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

- Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dimana Kabupaten Banyuasin merupakan sebagai lintasan dari kota-kota di Sumatera Selatan, Jambi, Padang, Pekanbaru, dan sebaliknya.
- Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menghubungkan kota-kota yang terdapat didalam Provinsi Sumatera Selatan (lintas Kabupaten/Kota).
- Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

d. Fasilitas Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalanserta marka jalan tersedia pada Tabel di bawah ini.

Data Rambu

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

No	Status Jalan	Peringatan	Larangan	Perintah	Petunjuk	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jalan Nasional Km.12 s/d Km.76	57	9	3	12	81
2	Jalan Provinsi Km.10 s/d Tj. Api-Api +Jl TI Keramat + Jl. Kenten Laut	51	0	0	4	55
3	Jalan Provinsi Sp. Tiga Mariana s/d Sp. Tiga Rambutan	32	12	1	5	50
4	Jalan Provinsi Simpang Tiga Betung s/d Gardu PLN	14	0	0	0	14
5	Jalan Kabupaten					
	Jl. Pangkalan Balai s/d Lebung ±20 km	27	0	0	0	27

Jl. Pangkalan Balai s/d Pengumbuk ±20 km	87	0	0	0	87
Jl. Sp. Pulau Rimau s/d Primer II Pulau Rimau	4	1	0	0	5
Jl. Mariana s/d Cinta Manis Baru, Muara Padang, Muara Sugihan	23	0	1	5	29
Jl. Perkantoran	23	3	62	0	88
Jl. Dalam Kota Kabupaten dan Jalan Lingkar/ Sekojo	75	6	0	4	85
Jl. Rambutan s/d Kebun Sahang	26	0	0	5	31
Jumlah / Rata – rata	393	31	67	30	434

Data APILL / Warning Light

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

No.	Status Jalan	Terpasang	Berfungsi	Tidak Berfungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jalan Nasional	3 unit	3 unit	-
2	Jalan Provinsi	8 unit	8 unit	-
3	Jalan Kabupaten	6 unit	6 unit	-

Data Guard Rail

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

No.	Status Jalan	Panjang Guard Rail (meter)			Kondisi Baik / Jelas (%)
		Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nasional	90	90	399	

Data Delineator

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

No.	Status Jalan	Jumlah Delineator (unit)			Keterangan
		Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nasional	132	132	132	
2	Provinsi	-	-	-	
3	Kabupaten				

e. Wilayah Parkir

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin juga menyelenggarakan parkir umum dengan fasilitas di Tepi Jalan Umum dan fasilitas melalui bentuk dari Jasa Pelayanan Umum. Titik-titik parkir yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyuasin dikelompokkan menjadi wilayah parkir (mencakup beberapa kecamatan) dengan jumlah parkir 7 (tujuh) wilayah parkir. Titik Lokasi Pelayanan parkir di wilayah Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 555/3701/Perhubkominformo 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum adalah :

- Sepanjang Jalan Palembang – Betung
- Kota Pangkalan Balai
- Sepanjang Jalan Pangeran Ayin (Kenten Laut), Talang Keramat yang masuk wilayah Kabupaten Banyuasin
- Sepanjang jalan menuju arah Tanjung Api-api yang masuk wilayah Kabupaten Banyuasin

- Sepanjang jalan menuju arah Mariana yang masuk wilayah Kabupaten Banyuasin
- Sepanjang jalan Simpang Lubuk Lancang – Pulau Rimau
- Sepanjang jalan menuju arah Lebung dan Pengumbuk.

f. Fasilitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Jasa Pelayanan Umum yang diselenggarakan juga oleh Dinas Perhubungan, Kabupaten Banyuasin adalah Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Pengujian kendaraan bermotor tersebut dimaksudkan untuk menguji persyaratan teknik dan persyaratan laik jalan Kendaraan Wajib Uji (umum dan khusus). Fasilitas pelayanan PKB yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin tersaji pada tabel berikut ini :

**Data Fasilitas Pelayanan PKB
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin**

No.	Uraian	Volume	Satuan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mobil Derek	2	Unit	V		
2	Mobil Uji Keliling Kendaraan Bermotor	1	Unit	V		
3	Alat Uji Statis Kendaraan Bermotor					
	- Brake Tester	1	Unit	V		
	- Axle Load Tester	1	Unit	V		
	- Head Light Tester	1	Unit	V		
	- Speed Meter Tester	1	Unit	V		
	- Genset	1	Unit	V		

g. Pelayanan Perizinan

Pelayanan Perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mencakup perizinan dengan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun tanpa target PAD atau hanya untuk pengawasan dan pengendalian saja. Pelayanan Perizinan yang selama ini sudah dilakukan secara terpadu di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin adalah : Pembuatan/Perpanjangan Izin Usaha, Pembuatan Izin Trayek, Perpanjangan Izin Trayek, Pemberian Izin Mobilisasi Alat Berat (RIG), Rekomendasi untuk kendaraan plat kuning.

h. Kendaraan Dinas dan Operasional

Kendaraan Dinas dan Operasional digunakan dalam rangka operasional Dinas dan Pelayanan di Bidang Perhubungan. Kendaraan Dinas dan Operasional yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin tersaji dalam Tabel berikut ini :

**Data Kendaraan Dinas dan Operasional
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin**

No.	Uraian	Volume	Satuan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mobil Dinas	5	Unit	V		
2	Mobil PATWAL	2	Unit	V	-	V
3	Mobil Unit PKB Keliling	1	Unit	V		
4	Mobil Derek	2	Unit	V		
5	Bus Sekolah	3	Unit	V		
6	Motor Dinas	4	Unit	V		
7	Motor BM	4	Unit	V		
8	Bus Air	1	Unit	V		
9	Speed Boat	5	Unit	V		

2.3.2. Angkutan Sungai

a. Sarana

Hingga saat ini jumlah sarana angkutan sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin berjumlah 1.860 unit sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Data Sarana Angkutan Sungai
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

No	Jenis Kapal	Jumlah Armada	Seat	Daya Muat	Kapasitas Angkutan
I	Angkutan Penumpang				
	1. Speed Boat ukn. Kecil	272 unit	9	-	-
	2. Speed Boat ukn. Besar	23 unit	35	-	-
II	Angkutan Barang				
	1. Jukung	276 unit	4	29 ton	7.830 ton
	2. Tug Boat	3 unit	3	20 ton	5.500 ton
	3. Ketek	1.221 unit	3	3 ton	3.600 ton
	4. Tongkang	65 unit	5	25 ton	1.625 ton
Jumlah		1.860 unit	44	57 ton	18.555 ton

dengan melayani trayek-trayek sebagaimana sebagai berikut :

Data Trayek Sarana Angkutan Sungai
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

No	Trayek	Jumlah	Seat	Kapasitas
1	Mariana – Sugihan Jalur 13	8 unit	-	-
2	Mariana – Kenten Laut	1 unit	-	-
3	Mariana – Telang Jalur 8	4 unit	-	-
4	Mariana – Karang Agung	4 unit	-	-
5	Mariana – P. Rimau	4 unit	-	-
6	Mariana – Sungsang	-	-	-
7	Mariana – Simpang PU	-	-	-
8	Kenten Laut – Telang	6 unit	-	-
9	Kenten Laut – P. Rimau	12 unit	-	-
10	Kenten Laut – Karang Agung	1 unit	-	-

11	Kenten Laut – Sungsang	-	-	-
12	Sungsang – Sungai Sembilang	-	-	-
Jumlah		40 unit	-	-

b Prasarana

Prasarana angkutan sungai yang ada sekarang adalah sebagai berikut

- (1) Pos Pengawas Upang, Pengumbuk, Penungguan dan Muara Kumbang digunakan untuk memungut retribusi bagi angkutan sungai yang melintasi Wilayah Kabupaten Banyuasin;
- (2) Dermaga Simpang PU, Dermaga / Pelabuhan Sungai Gasing dan Pelabuhan Sungai Sungsang sebagai tempat aktifitas bongkar muat barang dan turun naiknya penumpang dan sekaligus tempat memungut retribusi izin labuh / tambat dari semua jenis angkutan sungai yang ada, sementara Dermaga di Desa Cendana, Timbul Jaya dan Desa Telang Jaya untuk sementara belum ada petugas yang ditempatkan disana dan belum ada kontribusi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin;
- (3) Dermaga Sungai yang telah dibangun sampai tahun 2013 yaitu di Desa Argo Mulyo, Saleh Agung, Upang Induk, Tj. Kerang, Daya Utama, Tirto Mulyo, Teluk Betung, Merah Mata, Suka Mulia, Upang, Jalur 19, Borang, Sejagung, Sungsang, Kenten Laut, Ujung Tanjung, Rambutan dan Dermaga Karang Baru.
- (4) Pelabuhan Khusus/ Dermaga khusus dataran tempat tambat kapal yang terdata pada Dinas Perhubungan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Data Kapal di wilayah Pelabuhan Khusus/ Dermaga Khusus dan atau

Tempat Tambat Kabupaten Banyuasin

No	Nama Pemilik	Satuan	Keterangan
1	PT. Aspalindo	1 unit	-
2	PT. SAP	1 unit	-
3	PT. Laura Indo	1 unit	Gudang Udang
4	PT. Hijau Lestari	1 unit	-
5	PT. Medco Energi	1 unit	-
6	PT. Pertamina UP III	1 unit	-
7	SU. SSPB	1 unit	Gudang Ikan
8	CV. SNL	1 unit	Gudang Ikan
9	PT. Lestari Magris	2 unit	Gudang Ikan
10	Beskem Pertamina	1 unit	-
11	Kurnia Abadi	1 unit	Gudang Ikan
12	Sandi Ayu	1 unit	Gudang Ikan
13	PT. Mariana Bahagia	1 unit	Galangan Kapal
14	PT. Bayang	1 unit	Beras
15	PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya	1unit	Batu Bara
16	PT. Sinar Mas Jaya	1 unit	Batu Bara
17	PT. Lambung Karang Sakti	1 unit	Batu Bara
18	PT. Sinar Sekawan Abadi	1 unit	Batu Bara
19	PT. Cakrawala Sejahtera Sejati	1 unit	Batu Bara
20	PT. Catur Batavia Trasindo	1 Unit	Kayu
JUMLAH		21 unit	-

2.2 KINERJA PELAYANAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2016, Sehingga untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, dapat dilihat dari Tahun 2014-2018

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah dilaksanakan 6 (enam) program prioritas, yaitu :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin juga memberikan perizinan terhadap angkutan umum barang dan penumpang adapun data kinerja pelayanan yang telah diberikan yaitu sebagai berikut :

KINERJA PELAYANAN PERIZINAN ANGKUTAN

Jenis Pelayanan Perizinan Angkutan	2012	2013	2014	2015	2016
Pembuatan/ Perpanjangan Izin Usaha	2.363	1.951	2.287	1.386	1.230
Pembuatan Izin Trayek	3	14	0	-	0
Perpanjangan Izin Trayek	62	65	74	93	104
Pemberian Izin Mobilisasi Alat Berat (RIG)	1	0	0	-	0
Rekomendasi untuk kendaraan plat kuning	52	16	14	9	36
Jumlah	2.481	2.046	2.375	1.488	1.370

KINERJA PELAYANAN UJI KIR ANGKUTAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	UJI BERKALA					UJI PERTAMA				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Mobil Penumpang Umum (MPU)	100	98	130	96	81	17	11	4	1	1

2	Mobil Bus Umum (MBU)	9	9	16	10	4	0	0	0	0	0
3	Mobil Bus Tak Umum (MBTU)	35	36	40	38	36	2	2	3	3	2
4	Mobil Truck Umum (MTU)	80	178	258	281	298	7	66	119	55	16
5	Mobil Truck Tak Umum (MTTU)	1161	981	997	1.082	938	89	110	105	151	85
6	Mobil Pick UP Umum	11	89	93	1	5	2	0	0	0	0
7	Mobil Pick Up Tak Umum	1335	1.232	1.252	1.284	1.885	219	272	432	429	218
8	Kendaraan Khusus	21	19	18	14	13	5	10	14	9	1
9	Kereta Tempelan	4	1	0	4	0	0	0	0	0	0
10	Kereta Gendongan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Jumlah		2756	2643	2804	2810	3261	341	471	677	648	323

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam urusan perhubungan, dengan semakin padatnya aktivitas masyarakat, dari pagi hingga malam hari, berimplikasi pada padatnya jalur perhubungan dan transportasi. Kabupaten Banyuwasin bukanlah daerah padat yang terbayangi macet dalam kesehariannya. Namun hal tersebut justru menjadi peluang yang baik untuk mulai merintis jalur pesepeda, pejalan kaki, dan zona sekolah.

Adapun tantangan pelayanan organisasi perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwasin yaitu :

- (1) Disiplin pengguna jalan relatif rendah sehingga sering mengakibatkan kecelakaan;
- (2) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya penggunaan kendaraan pribadi;
- (3) Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah mengakibatkan percepatan kerusakan umur teknis jalan;
- (4) Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
- (5) Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien;

- (6) Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan terjadinya percepatan polusi udara akibat asap kendaraan bermotor;
- (7) Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di kawasan dalam kota dan terbatasnya kemampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan dan kemacetan;
- (8) Keberadaan SDM yang masih relatif terbatas menjadi salah satu faktor penghambat yang harus menjadi perhatian. Dengan meningkatnya dan pengoptimalisasi peran bidang perhubungan dalam penataan dan pengamanan lalu lintas teritorial, sehingga membutuhkan penambahan SDM, dan juga peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, serta kunjungan kerja ke daerah lain untuk belajar dari keberhasilan yang telah diraih oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin yaitu :

- (1) Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin;
- (2) Keberadaan jaringan transportasi berskala nasional sebagai modal dasar pengembangan transportasi Kabupaten Banyuasin;
- (3) Bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuasin yang konsekuensinya presentase angkutan umum perlu peningkatan yang ditunjang pula dengan kualitas angkutan umum tersebut;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1.1 Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

- a. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, selama 2 tahun terakhir (tahun 2012-2013), Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin telah berhasil melakukan berbagai kegiatan di bidang penyelenggaraan transportasi hal tersebut dapat dilihat dari alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :

**Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Tahun 2012-2013**

No	Tahun	Total APBD	Total Anggaran Dinas Perhubungan	Persentase
1	2012	1.315.601.278.681,15	13.919.443.992,00	1,05
2	2013	1.528.147.121.328,00	18.395.545.313,00	1,20

b. Keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas

**Data Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar, Lebar Rata-Rata Trotoar
Serta Panjang Jalan Yang Masih Perlu Dibangun Trotoar**

No. (1)	Status Jalan (2)	Dibutuhkan (Km) (3)	Sudah Dilengkapi (Km) (4)	Kondisi		
				Baik/ Jelas (%) (5)	Sedang (%) (6)	Rusak (%) (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jalan Nasional	61	5	-	30%	70%
2	Jalan Provinsi	82	-	-	-	-
3	Jalan Kabupaten	999	18,4	80%	20%	-

Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kabupaten (Marka)

No. (1)	Status Jalan	Dibutuhkan	Sudah Dilengkapi	Kondisi		
				Baik/ Jelas (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jalan Nasional	61	40	-	40	
2	Jalan Provinsi	97,5	-	-	-	
3	Jalan Kabupaten	1.124	10,8	10,8	-	

Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kabupaten (Pita Penggadu)

No.	Status Jalan	Dibutuhkan	Sudah Dilengkapi	Kondisi		
				Baik/ Jelas (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jalan Nasional	12	-	-	-	-
2	Jalan Provinsi	4	-	-	-	-
3	Jalan Kabupaten	12	4	30	-	-

Data Zebra Cross

No. (1)	Status Jalan	Dibutuhkan (Km)	Sudah Dilengkapi (Km)	Kondisi		
				Baik/ Jelas (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	Jalan Nasional	31	24	-	-	80 %
2	Jalan Provinsi	8	1	-	-	-
3	Jalan Kabupaten	6	2	-	-	-

Data Jumlah Halte
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

No.	Fasilitas	Dibutuhkan (unit)	Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)	Tidak Berfungsi (unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Halte Portable	60	52	43	-
2	Halte Permanen	60	6	6	-

**Kebutuhan Kelengkapan Jalan Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014 – 2018**

No.	Jenis Kelengkapan	Dibutuhkan	Terpasang	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Guardrail	1.500 m (manjang)	-	Kebutuhan jalan kabupaten
2	Dellinator	1000 unit	-	-
3	APILL / Warning Light	30 unit	-	-

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Terminal;
- d. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di bidang Perhubungan, melalui Peraturan Bupati Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 186 Tahun 2016

Tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 790 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Darat dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

- e. Sebagai lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pembangunan di daerah bidang perhubungan, Dinas Perhubungan dapat bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi OPD serta sebagai konsultan perencana pengembangan Wilayah.
- f. Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya untuk membiayai kegiatan Dinas Perhubungan dalam menjalankan tupoksinya;
- g. Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan bidang transportasi.

3.2. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

a. Ekonomi

Investasi yang rendah di sektor pengangkutan, tercermin dari masih tingginya tingkat inflasi di sektor pengangkutan yaitu sebesar 3,40 persen pada tahun 2012, hal ini sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Laju inflasi Kabupaten Banyuasin menurut Lapangan Usaha

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Pengangkutan dan Komunikasi	10,67	-3,53	0,63	3,38	3,40

b. Masih tingginya jumlah dan tingkat kecelakaan

Tingginya jumlah dan tingkat kecelakaan akibat kurang disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada, terbatasnya rambu dan fasilitas kelengkapan di jalan, hal ini sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuasin

Tahun 2010 - 2012

No	Tahun	Jumlah Kejadian Kecelakaan	Jumlah Korban			
			Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	2010	222	99	167	200	466
2	2011	250	106	154	263	523
3	2012	218	93	151	149	393

- c. Lemahnya *Law Enforcement*, ditandai dengan naik turunnya kasus pelanggaran lalu lintas
- d. Terintegrasinya sistem transportasi perkotaan;
- e. Tersedianya angkutan umum yang melayani seluruh pelosok Kabupaten

**Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum
di Kabupaten Banyuasin**

NO	RUTE TRAYEK	JUMLAH ARMADA			KET
		MENURU T IJIN	OPERASI	TDK BEROPERASI	
1	Sukajadi-Pkl.Balai-Terminal Betung	20	0	20	
2	Terminal Betung-Gasing	0	0	0	
3	Sukajadi-Pkl.Balai-Pengumbuk	12	0	0	
4	Sukajadi-Pkl. Balai-Pulau Rimau	16	0	16	
5	Sukajadi-Pkl. Balai	308	202	106	
6	Sukajadi-Serong-Sungai Rengit	17	0	17	
7	Pangkalan Balai-Terminal Betung	14	0	14	
8	Pangkalan Balai – Pulau Rimau	16	0	16	
9	Pangkalan Balai – Tanjung Kepayang	2	0	2	
10	Pangkalan Balai – Sedang	2	0	2	
11	Pangkalan Balai – Terentang	2	0	2	
12	Pangkalan Balai – Pengumbuk	1	0	1	

NO	RUTE TRAYEK	JUMLAH ARMADA			KET
		MENURU T IJIN	OPERASI	TDK BEROPERASI	
13	Pangkalan Balai – Tj. Menang	6	0	6	
14	Pangkalan Balai - Sri Bandung	2	0	2	
15	Pangkalan Balai – Lebong	6	0	6	
16	Terminal Betung-Talang Duku	0	0	0	
17	Terminal Betung – Paldas	0	0	0	
18	Terminal Betung – Bukit	0	0	0	
19	Terminal Betung – Talang Jaya	0	0	0	
20	Sukajadi – Semuntul	0	0	0	
21	Terminal Betung – Sungai Lilin	0	0	0	
22	Terminal Betung – Lais	0	0	0	
23	Mariana – Plaju – Prajen	0	0	0	
24	Cinta Manis Baru – Terminal Plaju	0	0	0	
25	Sungai Dua – Terminal Plaju	0	0	0	
26	Perumnas Meritai – Terminal Plaju	0	0	0	
27	Kenten Laut – Pasar Kuto	0	0	0	
28	Terminal Betung-Pkl.Balai-Sukajadi-Muara Sungsang-Tj. Api-Api	0	0	0	
29	Sukajadi-Gasing	0	0	0	
30	Kenten Laut-Tl.Keramat-MA.Sungsang-Tj. Api-Api	0	0	0	
31	MA. Sugihan-MA. Padang-Mariana-Tml. Plaju dalam kota kabupaten	1	0	1	
32	Merah Mata – Pusri	0	0	0	
33	Dalam Kota Kabupaten	0	0	0	
34	Tj. Api-api-Pel. Penyebrangan-Tml. Betung	10	10	0	

- f. Kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Banyuasin dibelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat Bangka, disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Lais, dan Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Jejawi Kecamatan Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80% wilayah datar berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20% lagi berombak sampai bergelombang berupa lahan kering dengan sebaran ketinggian 0-40 meter di atas permukaan laut.

Apabila potensi-potensi tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, tentu akan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Banyuasin.

- g. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.

Kekuatan Dan Kelemahan Internal

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan (*controllable*) secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan biasanya cenderung di luar kendali (*uncontrollable*) organisasi. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin menggunakan teknik Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats*) atau faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut ini:

Dalam Analisis Faktor Internal dipergunakan kondisi Kekuatan dan Kelemahan pada Internal Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Analisis faktor internal tersebut adalah sebagai berikut:

Kekuatan

- 1) Komitmen aparaturnya Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin;
- 2) Rehabilitasi dan Revitalisasi Terminal;
- 3) Tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya;
- 4) Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di bidang Perhubungan melalui Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 186 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 790 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Darat dan Unit Pelayanan Angkutan Sungai Laut dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

Kelemahan

- 1) Masih rendahnya disiplin kerja dan tidak dipahaminya tugas dan fungsi oleh sebagian pegawai;
- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelalulintasan/teknik sipil/teknik mesin, pembangunan infrastruktur;
- 3) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat;
- 4) Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.

Peluang Dan Tantangan Eksternal

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu Peluang dan Ancamanyang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

Peluang

- 1) Tersedianya angkutan umum yang melayani seluruh pelosok Kabupaten;
- 2) Letak geografis Kabupaten Banyuasin yang berada di jalur lalu lintas antar provinsi
- 3) Adanya Kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- 4) Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi;
- 5) Jumlah penduduk yang cukup besar.

Tantangan

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas serta tingginya jumlah dan tingkat kecelakaan. Ini diindikasikan dengan adanya kecenderungan naik turunnya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banyuasin;
- 2) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi;
- 3) Luasnya wilayah kerja.

Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Saat ini

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi dan telematika dapat disimpulkan, antara lain:

- Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (*overload* dan *oversize*) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam kota;
- Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap kelengkapan jalan;
- Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di daerah tetangga yaitu Kota Palembang, Kota Jambi dan Kabupaten Sekayu, hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuasin merupakan jalur lintas antar provinsi yang menyebabkan ketidakmampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;

Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain :

- Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;
- Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan prasarana transportasi

Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain :

- Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun manual;
- Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.

Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain :

- Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mengurangi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dalam penataan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;
- Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran;
- Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten Banyuasin diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (*strength*), faktor kelemahan (*weakness*), faktor peluang (*opportunity*) dan faktor tantangan (*threat*) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah serta rencana program, perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Banyuasin.

Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan, sebaliknya sumber daya internal tersebut

digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.

Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan Yang Berpengaruh Pada Tupoksi Dinas Perhubungan

Untuk mencapai hasil konsisten dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai/memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan analisis lingkungan yang ada, yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, sebagai strategi dalam bentuk faktor-faktor yang menentukan dan juga menunjang keberhasilan.

Dengan metode analisis SWOT, yang dikelompokkan dalam 4 kelompok strategi, yaitu: Kekuatan memanfaatkan Peluang (S-O), Kekuatan mencegah dan mengatasi Ancaman (S-T), Kelemahan memanfaatkan Peluang (W-O) dan Kelemahan mencegah dan mengatasi Ancaman (W-T).

Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas, dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut

Matrik SWOT

Faktor Internal	KEKUATAN	KELEMAHAN
Faktor Eksternal		

PELUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin; 1. Adanya kelompok-kelompok komunikasi sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin; 2. Mengoptimalkan kelompok-kelompok komunikasi sosial dalam rangka pemerataan informasi ke masyarakat.
TANTANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin; 2. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar dan sebagainya; 2. Penguatan kapasitas kelompok-kelompok komunikasi sosial.

Sebagaimana yang terlihat dalam matrik SWOT diatas, terdapat empat kelompok strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, yang berisikan strategi-strategi:

Pertama Strategi S–O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup:

- a. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin;
- b. Adanya kelompok-kelompok komunikasi sosial;

Kedua Strategi W – O, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin;

- b. Mengoptimalkan kelompok-kelompok komunikasi sosial dalam rangka pemerataan informasi ke masyarakat;

Ketiga Strategi S – T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman/tantangan, yang mencakup:

- a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin;
- b. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;

Keempat Strategi W – T, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, yang mencakup:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar dan sebagainya;
- b. Penguatan kapasitas kelompok-kelompok komunikasi sosial;

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Banyuasin yang terpilih untuk masa bakti 2013-2018; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyuasin 2006-2025; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2013-2018; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Banyuasin Tahun 2013–2018 adalah:“ ***Terwujudnya Kabupaten Banyuasin Yang Terdepan,Berdaya Saing dan mandiri***”

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Terdepan adalah paling utama / paling depan / penting / utama;

Berdaya Saing adalah mempunyai Interpretasi yaitu kemampuan untuk dapat tumbuh (berkembang) secara cepat diantara daerah-daerah lainnya sebagai pesaing dalam suatu daerah;

Mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan daerah lain;

Pokja PL KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 telah meneliti 100 pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih seperti pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.14.

Program-Program Pembangunan Bupati Banyuasin Periode 2013-2018

MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan Sebagai Penunjang Pembangunan Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan peningkatan jalan produksi antar desa dan kecamatan - Pembangunan jembatan dan pelabuhan lokal pasang surut - Pengembangan kawasan agro-ekowisata Suak Tapeh - Pembangunan jalan lingkar KM14-Gasing - Jalan TAA-Sungsang dan Tanjung Carat - Optimalisasi KTM Telang-Tanjung Lago - Terminal Intermoda Simpang PU (50 Ha) dan jalan sayap poros TAA - Pembangunan jembatan Sugihan Kiri-Sugihan Kanan, Sebusus Saleh - Pembangunan dermaga ponton Sri Menanti-P8 - Peningkatan jalan Palembang-Mariana-Muara Padang - Pembangunan jembatan dan kawasan Rantau Bayur - Pengembangan kawasan industri Gasing (5000 Ha) - Reklamasi Tanjung carat (3000 Ha) - Pengembangan pusat Docking-Gudang mariana (200 Ha) - Pengembangan kawasan bisnis dan permukiman KM14 - Pengembangan kawasan Jakabaring Rambutan - Pengembangan pelabuhan TAA (600 Ha) - Pengembangan banyuasin Valley (10.000 Ha) - Optimalisasi KTM Telang-Tanjung Lago (90.000 Ha) - Masterplan kawasan Banyuasin via Jembatan Musi 3
2. Memantapkan Iklim Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Kimbun-Migas Pulau Rimau-Tungkal Ilir (sawit) - Kawasan Kimbun Mariana-Muara Padang (sawit)

MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN
<p>Yang Kondusif Dengan Menjamin Keamanan Dan Kepastian Hukum Serta Kemudahan Lainnya Untuk Mewujudkan Daya Saing Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan hortikultura Sugihan Kiri - Kawasan Kimbun agroindustri-pangan KTM Telang-Tanjung Lago-Muara Padang - Kawasan Kimbun Suak Tapeh (karet) dan Betung - Kawasan kelapa dan bisnis Delta Upang - Kemitraan swasta pemerintah-masyarakat - Agrowisata pertanian pangan, hortikultura, peternakan, perikanan - Ekowisata lahan basah-pesisir-Taman Nasional sembilang - Kawasan industri kecil-menengah - Pengembangan sarana air bersih di perkotaan - Kawasan bisnis perdagangan dan jasa Betung - Kawasan industri Gasing-Kota Palembang (500 Ha) - Penyusunan Perda yang relevan dan mendukung - Public-private partnership - Rencana detail tata ruang kecamatan - Kawasan permukiman menengah-atas KM14 - Pengembangan kawasan pergudangan Mariana (200 Ha) - Kawasan permukiman Jakabaring Rambutan - Kawasan wisata golf dan lintas alam
<p>3. Membangun Tatanan Ekonomi Daerah Berdasarkan Keunggulan Kompetitif Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi lahan-air untuk pangan dan hortikultura - Peningkatan tata air-saluran-pintu dan tanggul banjir - Sosialisasi dan pengairan lahan sawah abadi - Peningkatan IP dan pasca panen tanaman pangan - Industri hilir padi dan jagung - Pupuk organik/biomassa - Pengembangan tapak jalur konservasi - Pengembangan ternak besar: sapi, kerbau, kambing - Pengembangan dan optimalisasi ternak unggas - Peningkatan teknologi hasil perikanan - Pengembangan budidaya perikanan darat

MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN
Kelautan, Dan Sektor Pertambangan Energy Menuju Banyuasin Sejahtera.	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pra-panen tanaman sawit yang ada - Industri hilir sawit - Optimalisasi/peremajaan tanaman karet - Industri hilir tanaman karet - Pertambangan dan migas - Optimalisasi batubara energi - Energi berbasis biomassa/bioenergi - Pengembangan energi terbarukan: pasang surut dan tenaga surya - Optimalisasi hutan tanaman industri dan produk hilir
4. Menyediakan Akses Layanan Pendidikan (IPTEK Dan IMTAQ) Berkualitas Dan Terjangkau Demi Mutu Sumber Daya Manusia Yang Unggul Yang Didukung Oleh Peningkatan Sistem Layanan Kesehatan Yang Murah, Berkualitas, Dan Merata Melalui Investasi Layanan Puskesmas.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan anak usia dini (Paud, TK, TPA) - Pendidikan dasar berkualitas - Pendidikan menengah dan lanjut - Politeknik/pelatihan/pendidikan luar sekolah - Pelayanan dan bimbingan keimanan - Peningkatan kualitas kehidupan beragama - Resolusi konflik antisipatif - Peningkatan peran swasta dan masyarakat untuk pendidikan - Pembinaan dan peningkatan Balai Latihan Kerja/kursus - Pembinaan dan peningkatan pondok pesantren - Optimalisasi RS Banyuasin - Peningkatan pelayanan puskesmas dan pustu - Program kemitraan praktek dokter muda pedesaan - Puskesmas apung Kimbun - Pengembangan obat-obatan tradisional - Investasi puskesmas terpadu - Kemitraan puskesmas pemerintahan dana CSR swasta - Gizi balita dan ibu hamil - Kesehatan manula - Corporate social responsibility (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat

MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Clean Governance) Dengan Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah Yang Amanah, Professional, Dan Berwibawa Untuk Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan aparatur - Analisis kinerja aparatur pemerintah kabupaten - Penjenjangan insentif dan disinsentif aparatur - Monitoring dan evaluasi kinerja aparat - Studi banding dan sister city - Pemagangan aparatur perencana di Bappenas - Peningkatan PAD - Intensifikasi penerimaan pajak daerah - Pendidikan non gelar pelatihan, short course IRC LDM - Pendidikan gelar-degree master dan doktor IRCLDM - Tata ruang kabupaten dan kecamatan - Rencana aksi daerah pembangunan berkelanjutan - Pendidikan pelatihan mangrove/pesisir untuk aparatur dan masyarakat - Silvofishery dan rehabilitasi/pokja mangrove pesisir - Pengurangan kebakaran hutan dan lahan - Konservasi dan rehabilitasi hutan/lahan - Tata air lahan gambut di hutan alam dan hutan tanaman - Pendidikan masyarakat sekitar hutan - Pengelolaan Taman Nasional Sembilang - Pengelolaan suaka alam Padang sugihan-Gajah

Sumber: Hasil Diskusi Pokja PL dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2013

Dari 100 program yang ingin diraih Bupati terpilih, ada beberapa yang ada kaitannya dengan bidang perhubungan (rencana program yang diwarnai merah). Sudah semestinya Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengakomodasinya dengan cara mengintegrasikannya ke dalam program yang telah ada dan membuat program baru jika rencana Bupati tersebut belum ada sebelumnya. Koordinasi dengan Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin sangat perlu dilakukan untuk merealisasikan rencana pembangunan tersebut menjadi sebuah program baru.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Visi

“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”

Misi

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten.
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Tujuan

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Dengan mempertimbangkan visi pembangunan, kompleksitas permasalahan dan untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan yang berkembang di Kabupaten Banyuasin, maka diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuasin 2011-2031 adalah:

“Mempercepat pertumbuhan Kabupaten Banyuasin melalui pengembangan pertanian dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan ditunjang kegiatan industri serta pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan”

Dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, maka rumusan kebijakan penataan ruang dari Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan wilayah sehingga meminimalisir ketimpangan antar wilayah;
2. Peningkatan aksesibilitas, layanan sarana dan prasarana melalui pengembangan sistem transportasi keseluruhan wilayah dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah Kabupaten Banyuasin;
3. Pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung;
4. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang dikelola secara optimal, terintegrasi, sesuai dengan daya dukung wilayah dan ramah lingkungan;
5. Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian sumber daya alam hayati, dan budaya Kabupaten Banyuasin.

Secara umum gambaran Rencana Pengembangan pembangunan bidang Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)

Rencana Pengembangan Terminal Kabupaten Banyuasin

NO	TIPE	LOKASI TERMINAL	KETERANGAN
RENCANA PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN			
1	A	Kecamatan Betung (PPK)	Terminal Penumpang
2	C	Sungsang	Terminal Penumpang
3	C	Kecamatan Suak Tapeh	Terminal Penumpang
4		Tanjung Lago	Terminal Khusus Batubara oleh PT. Servo
5		Tanjung Lago	Terminal Khusus Batubara oleh

NO	TIPE	LOKASI TERMINAL	KETERANGAN
			PT. Sinar Sekawan Abadi
6		Tanjung Lago	Terminal Khusus Batubara oleh PT. Lumbang Karang Sakti
7		Tanjung Lago	Terminal Khusus Batubara oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati
8		Muara Telang	Terminal Khusus Batubara oleh PT. Sinar Musi Jaya
9		Banyuasin I	Terminal Khusus CPO
10		Banyuasin I	Terminal Khusus Aspal
11		Banyuasin I	Terminal Khusus Galangan Kapal
12		Tanjung Api-Api	Terminal Khusus Galangan Kapal
RENCANA PEMBANGUNAN			
1	A	Tanjung Api-Api Kecamatan Banyuasin II (PKWp)	Terminal Utama untuk penumpang dan barang (berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan)
2	B	Pangkalan Balai dan Sebalik (PKL)	Terminal Pengumpan untuk penumpang dan barang (berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan)
3	C	Kecamatan Rambutan (PPK)	Terminal Lokal (Ketetapan dari kebijakan Kabupaten)
4	C	Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau (PPL)	Terminal Lokal (Ketetapan dari kebijakan Kabupaten)
6	C	Cintamanis Kecamatan Banyuasin I	Terminal Lokal (Ketetapan dari kebijakan Kabupaten)
7	C	Talangkeramat Kecamatan Talang Kelapa	Terminal Lokal (Ketetapan dari kebijakan Kabupaten)
8		Sebalik	Terminal multimoda

Sumber : RTRW Kabupaten Banyuasin 2012-2032

2. Rencana Pengembangan Pelayanan Transportasi Darat

Kondisi jaringan transportasi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penduduk sehari-hari tidak hanya terbatas pada jaringan jalannya, tetapi juga dari sarana angkutannya. Untuk rencana pengembangan angkutan umum di Kabupaten Banyuasin didasarkan pada simpul-simpul kegiatan yang akan dilayani dan berdasarkan sistem check point (terminal/transit) yang akan dilalui dalam jangkauan pelayanannya (radius). Untuk Jangkauan pelayanan dapat dibagi atas; angkutan antar kota; angkutan kota; dan angkutan perdesaan.

Rencana pengembangan angkutan umum berupa penambahan moda angkutan umum yang melayani kawasan untuk trayek, berikut ini :

Tabel 3.16.

Rencana Pengembangan Pelayanan Transportasi Darat Kabupaten Banyuasin

No.	Rute	Wilayah Pelayanannya
1.	Sukajadi – Pangkalan Balai	Angkutan antar perdesaan
2.	Serong - Sukajadi - Sungai Rengit - Talangkeramat	Angkutan antar perdesaan
3.	Pangkalan Balai – Pengumbuk	Angkutan antar perdesaan
4.	Pangkalan Balai – Tanjung Kepayang	Angkutan antar perdesaan
5.	Pangkalan Balai – Saterio - Sedang	Angkutan antar perdesaan
6.	Pangkalan Balai – Terentang	Angkutan antar perdesaan
7.	Pangkalan Balai – Sri Bandung	Angkutan antar perdesaan
8.	Pangkalan Balai – Lubuk Saung – Lebong	Angkutan antar perdesaan
9.	Terminal Betung – Tebenan – Purwosari – Talang Jaya Indah – Paldas	Angkutan antar perdesaan
10.	Terminal Betung – Sungai Lilin	Angkutan antar perdesaan
11.	Terminal Betung – Lais	Angkutan antar perdesaan
12.	Terminal Betung – Tanjung Api-Api	Angkutan antar perdesaan
13.	Sukajadi – Pangkalan Balai – Betung	angkutan antar kota dalam kabupaten

No.	Rute	Wilayah Pelayanannya
14.	Sukajadi – Pangkalan Balai – Pulau Rimau	angkutan antar kota dalam kabupaten
15.	Mariana – Plaju – Prajen	angkutan antar kota/kabupaten
16.	Cinta Manis Baru – Terminal Plaju	angkutan antar kota/kabupaten
17.	Sungai Dua – Terminal Plaju	angkutan antar kota/kabupaten
18.	Perumnas Meritai – Terminal Plaju	angkutan antar kota/kabupaten
19.	Plaju – Muara Padang	angkutan antar kota/kabupaten
20.	Jakabaring – kebonsahang	angkutan antar kota/kabupaten
21.	Kenten Laut – Pasar kuto	angkutan antar kota/kabupaten
22.	Betung - Sekayu	angkutan antar kota/kabupaten

Sumber : RTRW Kabupaten Banyuasin 2012-2032

3. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Untuk menghubungkan beberapa daerah di wilayah Kabupaten Banyuasin yang tidak dapat dilayani oleh transportasi jalan darat karena kondisi fisik dasar yang memerlukan investasi cukup besar dan belum sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Untuk itu maka pengembangan sistem jaringan transportasi air (sungai) merupakan aspek penting dalam membentuk struktur ruang wilayah yang direncanakan. Sistem angkutan sungai di wilayah Kabupaten Banyuasin sangatlah penting dalam mendukung pergerakan manusia dan barang. Untuk itu moda angkutan sungai perlu dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya.

Rencana peningkatan pelayanan dan penambahan dermaga diantaranya terlihat pada tabel 3.17 berikut ini :

Tabel 3.17

Rencana Pengembangan Dermaga Sungai Kabupaten Banyuasin

No	Dermaga	Lokasi
Rencana Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan		
1.	Dermaga Sungai Sungsang	Sungsang Kecamatan Banyuasin II

No	Dermaga	Lokasi
2.	Dermaga Simpang PU	Kecamatan Tanjung Lago
3.	Dermaga Gasing	Kecamatan Talang Kelapa
4.	Dermaga Pengumbuk	Kecamatan Rantau Bayur
5.	Dermaga Sungai Bugin	Kecamatan Banyuasin II
6.	Dermaga Jalur 8	Kecamatan Air Saleh
7.	Dermaga Jalur 6	Kecamatan Air Saleh
8.	Dermaga KTM Telang	Kecamatan Muara Telang
9.	Dermaga Sumber Jaya	Kecamatan Sumber Marga Telang
10.	Dermaga Mariana	Kecamatan Banyuasin I
11.	Dermaga Sumbermakmur	Kecamatan Muara Padang
12.	Dermaga Sidomulyo	Kecamatan Muara Padang
13.	Dermaga Simpang Jalur 18	Kecamatan Muara Padang
14.	Dermaga daya Utama	Kecamatan Muara Padang
15.	Dermaga Sidorejo	Kecamatan Muara Padang
16.	Dermaga Saleh Jaya	Kecamatan Air Salek
17.	Dermaga Pasar Saleh Jaya	Kecamatan Air Salek
18.	Dermaga Parit 9	Kecamatan Makarti Jaya
19.	Dermaga Saleh Agung	Kecamatan Air Salek
20.	Dermaga Srimulyo	Kecamatan Air Salek
21.	Dermaga Srikaton	Kecamatan Air Salek
22.	Dermaga Penyeberangan	Desa Upang
23.	Dermaga Telang Jaya (Jembatan 1)	Kecamatan Muara Telang
24.	Dermaga Pasar Telang Jaya	Kecamatan Muara Telang
25.	<i>Dermaga Sumber jaya (Jembatan 1 dan 2)</i>	Kecamatan Sumber Marga Telang
26.	Jemb.1, Pasar Sumber Rejo, Sumber Betung laut	Kecamatan Betung
27.	D.Sumber Rejo, Sumber Betung Laut	Kecamatan Betung
28.	D. Unggul Sari, Sumber Betung Laut	Kecamatan Betung
29.	D.Betung Laut, Pulau Rimau	Kecamatan Pulau Rimau

No	Dermaga	Lokasi
30.	D.Suka Mulya, Pulau Rimau	Kecamatan Pulau Rimau
31.	D.Penuguan, Pulau Rimau	Kecamatan Pulau Rimau
32.	D.Sri Agung, Kec.Karang agung Ilir	Kecamatan Banyuasin II
33.	Jemb.4, D.Karang Sari, Kec. Sungsang	Kecamatan Banyuasin II
34.	Jemb.5, D.Jatisari, Sungsang	Kecamatan Banyuasin II
35.	Jemb.1, D.Purwo Sari, Tanjung Lago	Kecamatan Tanjung Lago
36.	Jemb.2, D.Telangsari, Tanjung Lago	Kecamatan Tanjung Lago
37.	Jemb.4, D.banyu Urip, Tanjung Lago	Kecamatan Tanjung Lago
38.	Jemb.3, D.Mulyasari, Tanjung Lago	Kecamatan Tanjung Lago
39.	D.Sebalik	Kecamatan Tanjung Lago
40.	Jemb.1, D. Mukti Jaya, Muara Telang	Kecamatan Muara Telang
41.	D.Balai Makmur, Mariana	Kecamatan Banyuasin I
42.	D.Sungai Rumput, Mariana	Kecamatan Banyuasin I
43.	D.Sungai Rumput, Mariana	Kecamatan Banyuasin I
44.	D.Lebung, Rantau Bayur	Kecamatan Rantau Bayur
45.	Dermaga Tebing Abang, D.Pengumbuk, Rantau Bayur	Kecamatan Rantau Bayur
46.	D.Gasing, Talang Kelapa	Kecamatan Talang Kelapa
Rencana Pembangunan		
1.	Dermaga Penubuan	Kecamatan Pulau Rimau
2.	Dermaga Cintamanis lama/Prajin	Kecamatan Banyuasin I
3.	Dermaga Teluk Tenggulang	Kecamatan Pulau Rimau
4.	Dermaga Kenten Laut	Kecamatan Talang Kelapa

Sumber : RTRW Kabupaten Banyuasin 2012-2032

Rencana pengembangan moda angkutan untuk rute Makarti Jaya-Sungsang, Makarti Jaya-Kota Palembang, Tanjung Menang-Sungsang, Gasing-Muntok. Sedangkan untuk rencana penambahan moda ditujukan pada Kedukan dan terminal transit/check point di

Kota Mariana untuk dapat melayani wilayah perdesaan di ketiga kecamatan tersebut di atas, yakni :

- Sungai Kedukan-Kota Mariana
- Sungai Kedukan-Tirtoharjo via Kota Mariana dan via Salek Mukti
- Sungai Kedukan-Tirtoharjo via Kota Mariana dan via Muara Padang.
- Wilayah tengah dan barat Banyuasin difokuskan di terminal Tanjung Alang-alang/Sukajadi untuk dapat melayani wilayah perdesaan di Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin III, Betung, Talang Kelapa, Tungkal Ilir, Pulau Rimau, Tanjung Lago, Muara Telang, Sumber Marga Telang dan Kecamatan Banyuasin II.
- Penambahan angkutan perintis untuk trayek Kecamatan Tungkal Ilir – Kecamatan Pulau Rimau.

Pengembangan alur pelayaran sungai untuk memperlancar kegiatan ekonomi antar wilayah terutama yang belum bisa dilalui transportasi darat. Alur pelayaran sungai tersebut di antaranya melalui Sungai Musi, Sungai Gasing, Sungai Banyuasin, Sungai Telang, Sungai Lalan, Sungai Kenten, Sungai Salek, Sungai Tungkal, Sungai Calik, Sungai Primer 2, Sungai Kumbang, Sungai Padang, Sungai Sebalik, Sungai Makarti, jalur 6, jalur 8, jalur 10 (Kecamatan Air Salek), jalur 6, jalur 8, jalur 10 (Kecamatan Muara Telang), jalur 19, jalur 17 (Kecamatan Tanjung Lago), jalur 18, jalur 20 (Kecamatan Muara Padang), Jalur 13, Jalur 14, jalur 16 (Kecamatan Muara Sugihan). Dengan Rute :

- Mariana – Sungsang
- Mariana – Muara Telang
- Mariana – Sumber Marga Telang
- Mariana – Gasing
- Mariana - Simpang PU
- Mariana – Makartijaya
- Mariana – Muara Sugihan
- Mariana – Muara Padang
- Mariana – Karangagung Ilir
- Mariana – Penuguan
- Kenten Laut – Muara Telang
- Bunga Karang – Karangagung Ilir

3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banyuasin

3.6.1. Tujuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banyuasin

Tujuan dari pelaksanaan KLHS Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Program dan Kegiatan pembangunan yang tercantum di dalam Rancangan Awal Renstra sehingga dihasilkan rumusan mitigasi dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan atau penguatan substansi program dan kegiatan prioritas sehingga dihasilkan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 yang berwawasan lingkungan.

Adapun Sasaran dari pelaksanaan kegiatan penyusunan KLHS adalah:

1. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan sehingga menghasilkan program dan kegiatan yang ramah lingkungan;
2. Merumuskan mitigasi dan rekomendasi perbaikan dan atau penguatan substansi program dan kegiatan prioritas bidang perhubungan sehingga dihasilkan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 yang baik dan berwawasan lingkungan.

3.7. Penentuan Isu – isu Strategis

Tabel 3.15.

Identifikasi Program dan Kegiatan Prioritas
Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kab. Banyuasin Tahun 2014-2018

DAFTAR PENDEK ISU ISU PB PROGRAM PRIORITAS	Lingkung -an Ekologis	Ketersedia an Infrastruk tur	Kemandiri an Sosial dan Ekonomi	Daya Saing Daerah	Kegiatan yang terkait dengan isu-isu PB
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	0	0	
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	0	0	0	0	
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	0	0	0	
4. Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	

DAFTAR PENDEK ISU ISU PB PROGRAM PRIORITAS	Lingkung -an Ekologis	Ketersedia an Infrastruk tur	Kemandiri an Sosial dan Ekonomi	Daya Saing Daerah	Kegiatan yang terkait dengan isu-isu PB
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0	
6. Penyediaan Dokumen Perencanaan	0	0	0	0	
7. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Laut dan Penyebrangan • Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	0	1	0	1	
9. Peningkatan Pelayanan Angkutan	0	1	0	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Halte Bus, Taxi; Gedung Terminal
10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Dermaga • Rehab Berat Terminal Betung • Pembuatan Terminal Multi Moda Sebalik
11. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	0	0	0	1	
12. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan	0	1	0	0	

DAFTAR PENDEK ISU ISU PB PROGRAM PRIORITAS	Lingkung -an Ekologis	Ketersedia an Infrastruk tur	Kemandiri an Sosial dan Ekonomi	Daya Saing Daerah	Kegiatan yang terkait dengan isu-isu PB
Bermotor					
13. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	1	1	1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
14. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	0	0	0	1	
15. Fasilitasi Peningkatan SDM	0	0	1	1	
16. Kerjasama Informasi dengan Media Massa	0	0	0	1	

Keterangan:

* Angka 0 – apabila tidak ada keterkaitan antara program prioritas dengan isu PB (program tidak mempunyai dampak negatif atau positif terhadap isu yang ada).

** Angka 1 – apabila ada keterkaitan antara program dan isu strategis (program kemungkinan dapat mempengaruhi isu, baik positif maupun negatif)

Sumber: Hasil Rapat Tim Penyusun dengan Pemangku Kepentingan, Tahun 2014

Tim Penyusun KLHS Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018, telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan terhadap program-program Perhubungan yang diperkirakan mempunyai dampak dan atau resiko terhadap lingkungan ekologis.

Tabel 3.16.

Instrumen Perumusan Rekomendasi
dalam Penyusunan Renstra OPD

No	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif	

No	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif	
1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mismanagem ent</i> terhadap pengelolaan terminal, baik darat, laut maupun sungai, akan menyebabkan ketidaknyamanan lingkungan, seperti bau yang tidak sedap dari limbah/sampah, kesemrawutan lalulintas/ parkir, polusi udara, air dan suara, hingga nilai estetis yang hilang akibat penataan terminal yang kurang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan dengan instansi lain terkait urusan lintas sektor, seperti persampahan, keamanan, dll • Mengingat terminal adalah prasarana, maka tidak hanya terminal yang mendapat perhatian, sarana perhubungan pun harus diperhatikan, seperti contohnya uji knalpot angkutan umum karena sektor transportasi adalah penyumbang emisi gas rumah kaca tertinggi di 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep RTH pada terminal dapat ditingkatkan tidak hanya “hijau” tetapi juga “hidup”, dalam artian menyediakan tempat untuk hidupnya flora dan fauna tertentu, seperti ikan di dalam kolam air mancur, burung dalam sangkar, tanaman-tanaman hias, dll • Pemantapan koordinasi dengan instansi lain mengi ngat pengelolaan terminal 	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan harus tetap dilanjutkan dengan mempertimba ngkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperguna kan konsep-konsep yang berwawasan lingkungan

No	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif	
			Sumsel	<p>menyentuh sektor lain pula, seperti kebersihan dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adakan pos uji emisi kendaraan umum • Riset tentang alokasi dana bagi peremajaan angkutan umum 	

No	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif	
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan terminal dan dermaga menyebabkan terkonversinya lahan sehingga ada ancaman terhadap eksistensi ekosistem termasuk biota-biota pada lokus yang dapat mengancam keanekaragaman hayati Menurunnya kualitas air sungai dan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Lahan yang terbangun harus memberikan RTH yang memadai sehingga lahan yang terkonversi dapat terehabilitasi secara ekologis Melakukan studi kelayakan terlebih dahulu untuk menentukan apakah lokus dinilai layak dan baik secara ekologis Penerapan teknologi baru yang ramah lingkungan yang memungkinkan untuk tidak dilakukan pengecoran yang dapat merusak biota 	<ul style="list-style-type: none"> Pelibatan masyarakat untuk menggunakan areal terminal untuk berusaha sehingga terminal akan tetap “hidup” dan ada aktivitas Riset tentang sistem pelampung modular atau kubus apung sebagai salah satu solusi instalasi perairan yang ramah lingkungan yang dapat diterapkan pada pembuatan dermaga 	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan harus tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta mempergunakan konsep-konsep yang berwawasan lingkungan

No	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif	
			air dan karang		

Sumber: Hasil FGD Tim Penyusun KLHS Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 dengan Pemangku Kepentingan, Tahun 2014.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin terkait dengan pengintegrasian rekomendasi KLHS terhadap program-program Renstranya, antara lain:

1. Jika program dinilai penting untuk tetap diimplementasikan, maka lakukan riset mengenai metode-metode baru yang lebih ramah lingkungan serta penggunaan teknologi atau teori yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, dalam artian jika

metode-metode lama dirasa stagnan dalam pencapaian outcome-nya maka disarankan untuk mengembangkan metode baru.

2. Diutamakan untuk mencari metode baru yang berwawasan lingkungan, hemat energi, serta tidak memakan biaya besar.
3. Sangat penting untuk melakukan riset mengenai lokus suatu program untuk mencari lokus yang lebih baik.
4. Sangat perlu dicermati untuk menentukan timing yang tepat dalam pelaksanaan suatu program.
5. Jika pendanaan dirasa kurang, maka lakukan kajian ilmiah yang menjelaskan bahwa pentingnya penambahan dana dari suatu program.
6. Jika pendanaan suatu program dirasa kebesaran, penting untuk meninjau pengurangan dana untuk kemudian dialokasikan kepada program yang lebih memerlukan.
7. Perlu dikembangkan kerjasama pendanaan yang melibatkan pihak swasta, dalam hal ini contohnya adalah menggalakkan corporate social responsibility (CSR).
8. Penting untuk mengetahui aspirasi serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan suatu program untuk memaksimalkan pembangunan bagi masyarakat.
9. Penting untuk menguatkan kelembagaan internal dinas serta memperkuat jaringan koordinasi dengan instansi terkait lain, terutama jika program bersifat lintas sektor.
10. Sangat penting untuk menjalin kerjasama dengan para akademisi untuk mendapatkan saran-saran serta ide-ide segar program-program baru yang kemungkinan dapat dilaksanakan.
11. Perlu kreativitas dan inovasi serta jiwa visioner dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin untuk menemukan program-program baru yang titik berat programnya disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Banyuasin selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. VISI merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Kualitas menggambarkan karakteristik suatu produk. Dengan kata lain kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of costumers*). Pada dasarnya kualitas mengacu kepada sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk.

Pelayanan mencakup suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Atau segala sesuatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMND dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan atau peraturan perundang-undang yang berlaku.

Perhubungan mengandung pengertian bahwa kualitas pelayanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan dan menjangkau seluruh pelosok tanah air baik di sektor darat, laut maupun udara.

Pembangunan yang berkelanjutan mencakup proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan dimana pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam.

MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, telah disusun pula misi dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program dinas ingin dicapai.

Visi Kabupaten Banyuasin yaitu " **Terwujudnya Kabupaten Banyuasin Yang Terdepan, Berdaya Saing dan Mandiri** "

Misi Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sebagai penunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
2. Memantapkan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum serta kemudahan lainnya untuk mewujudkan daya saing daerah;
3. Membangun tatanan ekonomi daerah berdasarkan keunggulan kompetitif sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan sektor pertambangan serta energi menuju Banyuasin sejahtera;
4. Menyediakan layanan akses pendidikan (iptek dan imtaq) berkualitas dan terjangkau demi mutu sumberdaya manusia yang unggul yang didukung oleh peningkatan sistem layanan kesehatan yang murah, berkualitas, dan merata melalui investasi layanan puskesmas;
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah yang amanah, profesional dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Visi atau Pandangan ke masa depan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dengan memperhatikan isu-isu strategis serta permasalahan maka ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin adalah **"Tersedianya sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa perhubungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan"**. Visi ini menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dan diharapkan dapat menggugah dan mendorong peran serta atau keikutsertaan seluruh anggota organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin untuk merealisasikannya.

MISI Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin adalah :

1. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penyedia dan pengguna jasa perhubungan dalam rangka menunjang pembangunan;
2. Mewujudkan sistem transportasi terpadu yang dapat memberikan kepuasan bagi pengguna dan penyedia jasa.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1 Tujuan

Tujuan pembangunan bidang Perhubungan yang tertuang dalam RPJMD adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik;
4. Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana fisik;
5. Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, maka rumusan tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi;
2. Terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien.
3. Menggerakkan dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif baru di tengah masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
4. Terwujudnya peningkatan layanan transportasi yang berdaya saing.
5. Terwujudnya peningkatan manajemen perhubungan yang profesional.

4.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada RPJMD adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan;
3. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata;
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Meningkatnya pelayanan di bidang Perhubungan ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja secara keseluruhan lewat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan.

Gambaran tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwasin akan terlihat pada indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif .

Untuk mengetahui seberapa dampak pelayanan publik, dapat diukur melalui pencapaian kebijakan, program dan kegiatan. Dalam hubungan dengan program dan kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai adalah :

1. Indikator masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi;
2. Indikator keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik;
3. Indikator hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah;
4. Indikator manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
5. Indikator dampak (Impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan;

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan

Indikator Sasaran

Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan penyeberangan yang memadai;

2. Meningkatkan Pelayanan Jasa Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan

Indikator Sasaran

Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu.

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi Darat, Laut, Penyeberangan.

Indikator Sasaran

Tersedianya kualitas SDM yang profesional

4. Meningkatnya pelayanan publik dan administrasi perkantoran

Indikator Sasaran

Terwujudnya pelayanan publik dan administrasi perkantoran yang prima

5. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Indikator Sasaran

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4.3 Strategi Kebijakan

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Kabupaten Banyuwangi selama lima tahun mendatang (2014-2018), yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui penyediaan prasarana transportasi yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan terjangkau;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun antar wilayah terkait guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi adalah:

1. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;

2. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin;
3. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas;
4. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan yang representatif;
5. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan;
7. Meningkatkan dan mengembangkan keterpaduan pada rencana tata ruang dan dinamika perkembangan masyarakat;
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan;
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi.

Tabel
Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN
Tersedianya sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa perhubungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan	1.	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penyedia dan pengguna jasa perhubungan dalam Menunjang pembangunan;	1.1	Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi;	1.1.1	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan
						Indikator Sasaran
						Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan penyeberangan yang memadai;
			1.2	Menggerakkan dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif baru di tengah masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.	1.2.1	Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Perhubungan.
Indikator Sasaran						
			Tersedianya infrastruktur teknologi Perhubungan yang memadai;			

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
	2. Mengembangkan serta meningkatkan pelayanan jasa transportasi dalam rangka menunjang pembangunan;	2.1. Terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien.	2.1.1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Informasi dan Komunikasi dalam Menciptakan Keterbukaan dan Kebebasan Masyarakat dalam Mengakses Informasi. Indikator Sasaran Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyuasin yang berwawasan global;
		2.2. Terwujudnya peningkatan layanan transportasi yang berdaya saing.	2.2.1. Meningkatkan Pelayanan Jasa Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan Indikator Sasaran Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu.
	3. Mewujudkan sistem transportasi terpadu yang dapat memberikan kepuasan bagi pengguna dan penyedia jasa.	3.1. Terwujudnya peningkatan manajemen perhubungan, yang profesional.	3.1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi Darat, Laut, Penyeberangan, Pos dan Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN
						Indikator Sasaran
						Tersedianya kualitas SDM yang profesional
					3.1.2	Meningkatnya pelayanan publik dan administrasi perkantoran
						Indikator Sasaran
						Terwujudnya pelayanan publik dan administrasi perkantoran yang prima
					3.1.3	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
						Indikator Sasaran
						Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatannya:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah;
4. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah;
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
12. Penyediaan makanan dan minuman;
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatannya:

1. Pembangunan Gedung Kantor;
2. Pengadaan Kendaraan dinas operasional;
3. Pengadaan Meubeleur;

4. Pengadaan Alat Komunikasi;
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
8. Pengadaan Body Speed Boat;

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatannya : Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatannya : Pendidikan dan pelatihan formal.

5. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Kegiatannya :

1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan;
2. Survei penentuan titik lokasi perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
3. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Review perencanaan pembangunan dermaga sebalik.

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

7. Program peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatannya :

1. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
2. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan;
4. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
5. Kegiatan pengaturan lalu lintas angkutan pada hari-hari besar;
6. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan keselamatan di perairan;
7. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Event Internasional "Musi Tri buoatton"

8. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Kegiatannya :

1. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal;
2. Pembangunan dermaga;
3. Pembuatan batas tanah pemerintah (Dishub) dan pensertifikatan;
4. Pembangunan dermaga sungai Sebalik;

9. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Kegiatannya :

1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat;
2. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas sungai;

10. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Kegiatannya :

1. Perkerasan lapangan parkir
2. Pengadaan alat uji kendaraan bermotor.

11. Program Penyediaan Dokumen Perencanaan

Kegiatannya :

1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan;
2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
3. Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK)

6.1. Indikator Kinerja

Keberhasilan pembangunan bidang Perhubungan Kabupaten Banyuasin dapat di lihat melalui beberapa indicator antara lain :

NO	VISI	MISI	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					
						2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tersedianya Sarana dan Prasarana sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa perhubungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penyedia dan pengguna jasa perhubungan	Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan penyeberangan yang memadai	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan		√	√	√	√	√
Survei penentuan titik lokasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan						-	√	√	√	√	
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan						√	√	√	√	√	
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat						√	√	√	√	√	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						√	√	√	√	√	
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan						√	√	√	√	√	
Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik						-	√	-	-	-	

NO	VISI	MISI	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					
						2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal		-	-	√	-	-
					Pembangunan Dermaga		√	√	√	√	√
					Rehab Berat Terminal Betung		√	√	√	√	√
					Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub) dan Persertifikatan		√	√	√	√	√
					Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik		-	-	√	√	-
		2.Mewujudkan Sistem Transportasi Terpadu yang dapat Memberikan Kepuasan bagi Pengguna dan Penyedia Jasa	Meningkatkan Pelayanan Jasa Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan dokumen Perencanaan		√	√	√	√	√
					Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)OPD		√	-	-	-	√
					Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK)		-	√	-	-	-
			Meningkatnya Pelayanan Publik dan Administrasi	Program Pelayanan Administrasi	Penyediaan jasa surat menyurat		-	√	√	√	√
					PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Air danListrik		√	√	√	√	√

NO	VISI	MISI	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					
						2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			perkantoran yang prima	Perkantoran	Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah		√	√	√	√	√
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional						
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		√	√	√	√	√
					Penyediaan jasa kebersihan kantor		√	√	√	√	√
					Pengadaan Alat Tulis Kantor				√	√	√
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		√	√	√	√	√
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		√	√	√	√	√
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		√	√	√	√	√
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		√	√	√	√	√
					Penyediaan makanan dan minuman		√	√	√	√	√
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah		√	√	√	√	√

NO	VISI	MISI	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					
						2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		√	√	√	√	√
			Meningkatnya peningkatkan sarana dan prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor		√	√	√	-	-
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		√	√	-	-	√
					Pengadaan Meubelur		√	√	√	√	√
					Pengadaan Alat Komunikasi		-	-	√	√	-
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		√	√	√	√	√
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		√	√	√	√	√
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		√	√	√	√	√
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet		-	√	√	√	√
					Pengadaan Body Speed Boat			√	√	√	√
			Meningkatnya disiplin aparatur	Program Peningkatan	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya		√	√	√	√	√

NO	VISI	MISI	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					
						2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Disiplin Aparatur							
			Meningkatnya kapasitas dan sumber daya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal		√	√	√	√	√
		4. Mewujudkan Sistem Transportasi Terpadu yang dapat Memberikan Kepuasan bagi Pengguna dan Penyedia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Darat, Laut, Penyeberangan, Pos dan Telekomunikasi, Teknologi	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya		√	√	√	√	√
					Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		√	√	√	√	√
					Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan		√	√	√	√	√
					Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan		√	√	√	√	√
					Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada		√	√	√	√	√

NO	VISI	MISI	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					
						2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Informasi dan Komunikasi		Hari-Hari Besar						
					Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan		√	√	√	√	√
					Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		√	√	√	√	√
				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat		√	√	√	√	√
					Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai		√	√	√	√	√
				Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Perkerasan Lapangan Parkir		√	√	√	√	√
					Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor		-	-	√	√	√

5.2 Kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas adalah :

1. Masyarakat pengguna jasa transportasi;
2. Pelaku usaha bidang transportasi;
3. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan;

5.3 Pendanaan

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

1. APBD Kabupaten Banyuasin;
2. APBD Provinsi Sumatera Selatan;
3. APBN dan;
4. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll).

BAB VI PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan

kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuasin dan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin tahun – tahun sebelumnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUASIN,

DTO

H. SUPRIADI, SE., M.Str.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620509 198202 1 001

HASIL REVIU RENSTRA
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014 - 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Renstra					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
										2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Terwujudnya kinerja Dinas Perhubungan, secara profesional	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang profesional dan akuntabel	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran dapat terlayani dengan baik; - Persentase koordinasi dan kegiatan operasional perkantoran.	persen	jumlah pelayanan administrasi yg dpt terlayani dengan baik / jumlah pelayanan administrasi yg seharusnya terlayani dengan baik x 100%	Terpenuhinya sarana prasarana kerja untuk menunjang kualitas kinerja aparatur.	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Dishub Kab. Banyuasin
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran pengiriman surat menyurat	bulan	jumlah pengiriman surat menyurat	Lancarnya aktifitas perkantoran	0	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	48 bulan	Dishub Kab. Banyuasin

					2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan jaringan, tersedianya air dan listrik	rekening	jumlah rekening pembayaran dalam penyediaan listrik, air dan jaringan internet yang dikeluarkan	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan	Dishub Kominfo Kab. Banyuasin
					3.	Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Tersedianya asuransi kendaraan operasional	unit	jumlah kendaraan yang mendapat premi asuransi	Terjaminnya pelayanan asuransi kendaraan operasional	2 unit	3 unit	4 unit	5 unit	6 unit	20 unit	Dishub Kab. Banyuasin
					4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	orang	jumlah bulan dalam kegiatan jasa administrasi keuangan yang dikeluarkan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan sebanyak 19 orang	29 orang	23 orang	19 orang	20 orang	20 orang	111 orang	Dishub Kab. Banyuasin
					5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	bulan	jumlah pelaksanaan dalam kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Berfungsinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	Dishub Kab. Banyuasin

					6.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	termin	jumlah Termin dalam ATK yang dikeluarkan	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor sebanyak 50 jenis alat tulis kantor	4 termin	4 termin	4 termin	4 termin	4 termin	20 termin	Dishub Kab. Banyuasin
					7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	jumlah bulan dalam barang cetakan dan penggandaan yang dikeluarkan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 21 jenis barang cetakan dan 2 jenis penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	Dishub Kab. Banyuasin
					8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan	bulan	jumlah bulan dalam penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48 Bulan	Dishub Kab. Banyuasin
					9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	tahun	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	4 Tahun	Dishub Kab. Banyuasin

					apan Kantor											
					10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eksemplar	jumlah bahan bacaan yang disediakan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	1.680 Eksemplar	1.680 Eksemplar	1680 eksemplar	1680 eksemplar	1680 eksemplar	8400 Eksemplar	Dishub Kab. Banyuasin
					11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Pegawai	kali	jumlah orang yang disediakan dalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman rapat	6 Kali	6 Kali	-	6 Kali	6 Kali	24 kali	Dishub Kab. Banyuasin
					12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	kali	jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85 Kali	60 kali	60 kali	252 Kali	319 Kali	776 Kali	Dishub Kab. Banyuasin

					13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	kali	jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah	Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	72 Kali	79 kali	51 kali	288 Kali	360 Kali	850 Kali	Dishub Kab. Banyuasin
2	Terwujudnya kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika secara profesional	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai; - Jumlah Kebutuhan kendaraan dinas operasional dan angkutan perintis	persen	jumlah sarana dan prasarana kantor yang memadai / jumlah sarana dan prasarana kantor yang seharusnya memadai x 100 %	Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Dishub Kab. Banyuasin
					1. Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan/ gedung kantor	persen	jumlah gedung kantor yang dibangun	Terpenuhinya bangunan/gedung kantor	20%	35%	50%	60%	80%	100%	Dishub Kab. Banyuasin
					2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan operasional kantor	unit	jumlah kendaraan dinas yang disediakan	Terpenuhinya kelancaran operasional kantor	2 Unit	3 Unit	4 Unit	-	2 Unit	11 Unit	Dishub Kab. Banyuasin

					3.	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meubeleur kantor	jenis	jumlah meubeul kantor yang disediakan	Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran	5 jenis	5 jenis	-	5 jenis	5 jenis	20 jenis	Dishub Kab. Banyuasin
					4.	Pengadaan Alat Komunikasi	Tersedianya Handy Talky	unit	jumlah alat komunikasi yang disediakan	Terpenuhinya peralatan komunikasi	-	-	-	10 unit	-	10 unit	Dishub Kab. Banyuasin
					5.	Pengadaan Body Speed Boat	Tersedianya body speed boat	unit	Jumlah Speed Boat yang tersedia	Terpenuhinya kelancaran operasional kantor	6 Unit	-	-	6 Unit	6 Unit	18 unit	Dishub Kab. Banyuasin
					6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	paket	jumlah pekerjaan dalam pemeliharaan gedung kantor	Berfungsinya gedung kantor dengan baik	20%	35%	50%	60%	80%	100%	Dishub Kab. Banyuasin
					7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional dengan baik	unit	jumlah kendaraan dinas yang melakukan pemeliharaan	Kelancaran operasional kendaraan bermotor	24 Unit	24 Unit	17 unit	24 Unit	24 Unit	113 Unit	Dishub Kab. Banyuasin

					8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik	unit	jumlah pekerjaan dalam pemeliharaan peralatan gedung kantor	Berfungsinya peralatan kantor	10 unit	25 unit	30 unit	40 unit	60 unit	165 unit	Dishub Kab. Banyuasin
					9.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik	bulan	jumlah SKPD dalam pemeliharaan Jaringan internet	Berfungsinya peralatan jaringan internet perkantoran	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	48 bulan	Dishub Kab. Banyuasin
					10.	Pengadaan Software Monitoring dan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Software Monitoring dan Administrasi Kepegawaian	-	-	Tertibnya penyimpanan data kepegawaian	-	-	-	-	-	-	Dishub Kab. Banyuasin
					11.	Pengadaan Alat Digitalisasi Dokumen	Tersedianya Alat Digitalisasi Dokumen Kantor	-	-	Tertatanya dokumen kepegawaian	-	-	-	-	-	-	Dishub Kab. Banyuasin

					Kantor											
3	Terwujudnya kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika secara profesional	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatkan disiplin aparatur	stell	jumlah pakaian dinas yang disediakan	Adanya Peningkatan disiplin aparatur	95 Stell	95 stell	-	95 Stell	95 Stell	495 Stell	Dishub Kab. Banyuasin
					1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	stell	jumlah pakaian dinas yang disediakan	Terpenuhiya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	95 Stell	95 stell	-	95 Stell	95 stell	380 stell	Dishub Kab. Banyuasin
4	Terwujudnya kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika secara profesional	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlatihnya sumber daya aparatur yang handal	orang	jumlah pegawai yang melakukan bimtek/diklat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8 Orang	10 Pegawai	10 Pegawai	10 Pegawai	10 Pegawai	98 Pegawai	Dishub Kab. Banyuasin

					1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan formal	orang pegawai	jumlah pegawai yang melakukan bimtek/diklat	Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8 Pegawai	10 Pegawai	10 Pegawai	10 Pegawai	10 Pegawai	48 Pegawai	Dishub Kab. Banyuasin
					2. Pembekalan Materi Kedinasaan bagi Aparatur Perhubungan	Tersedianya tenaga aparatur yang handal	-	-	Terciptanya tertib administrasi dan disiplin aparatur	-	-	-	-	-	-	Dishub Kab. Banyuasin
5	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	persentase sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas	persentase sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan Jumlah Sarana dan Fasilitas Perhubungan	persen	jumlah dokumen perencanaan fasilitas perhubungan dibagi jumlah kebutuhn dokumen perencanaan fasilitas perhubungan yang dibutuhkan sd tahun 2018	Terwujudnya pengelolaan transportasi darat dan sungai yang handal	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Dishub Kab. Banyuasin

					1	perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan	dokumen	jumlah dokumen data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan	Validitas data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan	-	1 Set Dokumen	-	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	3 Set Dokumen	Dishub Kab. Banyuasin
					2	Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Tersedianya dokumen data perhitungan lalu lintas	dokumen	jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas	Termanfaatkannya data perhitungan lalu lintas	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	5 Set Dokumen	Dishub Kab. Banyuasin
			jumlah peserta yang akan disosialisasi		3	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	orang	jumlah peserta yang akan disosialisasi	Terlaksananya Pemahaman materi oleh peserta sosialisasi	26 Orang	25 orang	40 Orang	50 Orang	50 orang	191 orang	Dishub Kab. Banyuasin

			jumlah dokumen dalam monev dan pelaporan		4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dan tersedianya buku laporan kegiatan	dokumen	jumlah dokumen dalam monev dan pelaporan	Berfungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bermanfaatnya buku laporan kegiatan	4 Set Dokumen	4 Set Dokumen	4 Set Dokumen	4 Set Dokumen	4 Set Dokumen	20 Set Dokumen	Dishub Kab. Banyuasin
			jumlah dokumen perencanaan dermaga Sebalik		5 Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik	Tersedianya dokumen perencanaan dermaga Sebalik	-	jumlah dokumen perencanaan dermaga Sebalik	Termanfaatnya dermaga Sebalik	-	-	-	-	-	-	Dishub Kab. Banyuasin
6			jumlah pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ	unit	jumlah pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ di Kabupaten Banyuasin	-	-	-	-	2 Unit	-	
					1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	-	unit	jumlah pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Terpeliharanya Terminal / Pelabuhan di Kabupaten Banyuasin	-	-	-	-	2 Unit	-	

8	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik di Kab. Banyuasin	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik di Kab. Banyuasin	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase SDm berkualitas dan tingkat disiplin berlalu lintas	persen	Jumlah Angkutan Umum Darat dalam kondisi baik yang melayani Wilayah Kab. Banyuasin yang ada / Jumlah Angkutan Umum yang ada yang melayani Wilayah Kab. Banyuasin	Peningkatan persentase SDM berkualitas dan tingkat disiplin berlalu lintas	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Dishub Kab. Banyuasin
					1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota.	kali	jumlah razia angkutan umum per tahun	Peningkatan disiplin berlalu lintas di jalan raya	3 Kali	3 kali	4 kali	12 Kali	15 Kali	37 Kali	Dishub Kab. Banyuasin

					2	Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan	kali	jumlah pelaksanaan dalam kegiatan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatnya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan	2 Kali	3 kali	2 kali	8 Kali	10 Kali	25 Kali	Dishub Kab. Banyuasin
					3	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Jurudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota.	orang	Jumlah orang yang terpilih dalam penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan	Peningkatan disiplin masyarakat berlalu lintas	2 Orang	2 Orang	2 orang	10 Orang	14 Orang	20 Orang	Dishub Kab. Banyuasin

					4	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	orang	Jumlah aparaturnya yang melakukan pelayanan angkutan	Kelancaran tugas koordinasi pelayanan angkutan	32 Orang	32 orang	32 orang	32 orang	32 orang	160 Orang	Dishub Kab. Banyuasin
					5	Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar	Terlaksananya pengaturan lalu lintas lebaran, natal, tahun baru	kegiatan	jumlah pelaksanaan kegiatan dalam pengaturan lalu lintas lebaran, natal dan tahun baru	Kelancaran lalu lintas lebaran, natal, tahun baru	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	16 kegiatan	Dishub Kab. Banyuasin
					6	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan	Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Perairan	kali	Jumlah pelaksanaan dalam kegiatan sosialisasi keamanan dan keselamatan di perairan	Meningkatnya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Perairan	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	15 Kali	Dishub Kab. Banyuasin

					7	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014	orang	Jumlah orang yang terpilih dalam DUTA Pelajar pelopor	Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Tahun 2014	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	200 Orang	Dishub Kab. Banyuasin
					8	Dukungan Event Internasional "Musik Triboaton"	Terlaksananya even internasional Musik Triboaton	kali	Jumlah pelaksanaan dalam kegiatan Event Internasional "Musik Triboaton"	Meningkatnya hubungan kerjasama Internasional	0	1 kali	-	1 kali	1 kali	3 kali	Dishub Kab. Banyuasin
10	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase dermaga sungai di Kab. Banyuasin	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Persentase dermaga sungai di Kab. Banyuasin	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	persen	jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia / jumlah kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan sampai Tahun 2018 x 100%	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Dishub Kab. Banyuasin	

					1	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	Jumlah Halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	unit	Jumlah Halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Berfungsinya halte bus di Kabupaten Banyuasin	-	-	-	2 Unit	2 Unit	4 Unit	Dishub Kab. Banyuasin
					2	Pembangunan Dermaga	Jumlah Dermaga dalam Kabupaten	unit	Jumlah Dermaga Sungai dalam kondisi baik di Kab. Banyuasin / Total kebutuhan Dermaga Sungai di Kab. Banyuasin	Berfungsinya dermaga dan penghubung tambatan kapal	36 Unit	6 unit	5 unit	4	3	54 Unit	Dishub Kab. Banyuasin
					3	Rehab Berat Terminal	Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	unit	jumlah terminal yang melakukan perbaikan	Beroperasionalnya terminal betung bagi masyarakat	1 unit	1 unit	-	1 unit	1 unit	4 unit	Dishub Kab. Banyuasin
					4	Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkominfo)	Tersedianya lahan pemerintah (Dishubkominfo) Kab. Banyuasin yang sudah tersertifikasi	dokumen	persentase tahapan pembuatan batas tanah pemerintah	Tersertifikasinya lahan pemerintah (Dishubkominfo) Kab. Banyuasin	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	Dishub Kab. Banyuasin

					omunfo) dan Persertifi katan													
					5	Pembang unan Dermaga Sungai Sebalik	Tersediaanya Terminal Multi Moda Sebalik di Kabupaten Banyuasin	unit	persentase tahapan pembangunan dermaga sungai sebalik	Berfungsinya Terminal Multi Moda Sebalik di Kab. Banyuasin	-	-	-	1 unit	1 unit	2 unit		Dishub Kab. Banyuasin
12	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase rambu darat dan sungai dalam kondisi baik di wilayah Kab. Banyuasin	tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas	Persentase rambu darat dan sungai dalam kondisi baik di wilayah Kab. Banyuasin	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Darat maupun di Perairan	persen	jumlah rambu lalu lintas darat dan sungai yang tersedia / jumlah kebutuhan rambu lalu lintas darat dan sungai sampai Tahun 2018 x 100%	Tingkat Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Darat maupun di Perairan	20%	40%	60%	80%	100%	100%		Dishub Kab. Banyuasin	

					1	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu/Marka/Guardrail) pada wilayah Kabupaten	unit	Jumlah rambu-rambu lalu lintas darat	Berfungsinya Rambu lalu lintas darat	20 unit	30 unit	40 unit	50 unit	60 unit	200 unit	Dishub Kab. Banyuasin
					2	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai	Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten	unit	Jumlah rambu lalu lintas sungai di kab. Banyuasin	Berfungsinya Rambu lalu lintas sungai	20 unit	50 unit	80 unit	110 unit	140 unit	400 unit	Dishub Kab. Banyuasin
13	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase Kendaraan Bermotor Yang laik uji	tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas	Persentase Kendaraan Bermotor Yang laik uji	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana PKB	persen	Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik uji / Total Jumlah Kendaraan Bermotor x 100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana PKB		20%	40%	60%	80%	100%	100%	Dishub Kab. Banyuasin
					1	Perkerasan Lapangan Parkir	Tersedianya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak	persen	Persentase tahapan perkerasan lapangan parkir	Berfungsinya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak	20%	40%	60%	80%	100%	300%	Dishub Kab. Banyuasin

					2	Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Uji	persen	Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik uji / Total Jumlah Kendaraan Bermotor x 100%	Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor	-	-	-	60%	-	60%	Dishub Kab. Banyuasin
14	Terwujudnya kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara profesional	Jumlah Dokumen Perencanaan yang berkualitas	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan yang berkualitas	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terwujudnya sistem perencanaan (Perhubungan)Jangka Pendek dan Jangka Menengah	dokumen	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	Terwujudnya sistem perencanaan jangka pendek dan jangka menengah dinas terintegrasi dengan perencanaan dinas Kabupaten	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	15 Dokumen	29 Dokumen	Dishub Kab. Banyuasin	
					1	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	Tersedianya data perencanaan yang akurat	dokumen	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	Terwujudnya Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan dokumen Perencanaan yang baik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	24 Dokumen	Dishub Kab. Banyuasin

					2	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersedianya dokumen Rencana Strategis SKPD	dokumen	jumlah dokumen Renstra SKPD	Terwujudnya penyusunan Rencana Strategis SKPD	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	Dishub Kab. Banyuasin
					3	Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (Tatalok)	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu	dokumen	jumlah dokumen Tatalok	Termanfaatnya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu	-	-	-	1 dokumen	1 Dokumen	Dishub Kab. Banyuasin
JUMLAH																